

SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PELAKSANAAN HUKUMAN MATI BAGI WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA

(Studi Kasus Eksekusi Mati terhadap Warga Negara Asing
pada Awal Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo
dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla)



OLEH
EKHO JAMALUDDIN P. NALOLE
NIM B 111 11 003

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2016

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP
PELAKSANAAN HUKUMAN MATI BAGI
WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA**

(Studi Kasus Eksekusi Mati terhadap Warga Negara Asing
pada Awal Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo
dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Pada Bagian Hukum Internasional
Program Studi Ilmu Hukum

OLEH :

EKHO JAMALUDDIN P. NALOLE

B 111 11 003

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2016

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PELAKSANAAN HUKUMAN MATI BAGI NEGARA ASING DI INDONESIA

(Studi Kasus Eksekusi Mati terhadap Warga Negara Asing pada Awal Masa
Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla)

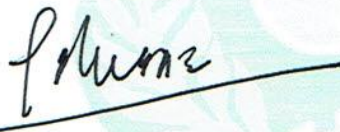
disusun dan diajukan oleh

EKHO JAMALUDDIN P. NALOLE
B 111 11 003

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Kamis, 3 Maret 2016
dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua



Dr. Abdul Maasba Magassing, S.H., M.H.
NIP. 19550803 198403 1 002

Sekretaris



Dr. Marthen Napang, S.H., M.H., M.Si.
NIP. 19570312 198601 1 001

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : **EKHO JAMALUDDIN P. NALOLE**

Nomor Pokok : **B 111 11 003**

Bagian : **Hukum Internasional**

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL
TERHADAP PELAKSANAAN HUKUMAN MATI
BAGI WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA**
(Studi Kasus Eksekusi Mati terhadap Warga Negara
Asing pada Awal Masa Pemerintahan Presiden Joko
Widodo dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla)


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi

Makassar, Februari 2016

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,



(Dr. Abdul Maasba Magassing, S.H.MH)

NIP. 19550803 198403 1 002



(Dr. Marthen Napang, S.H., M.H. M.Si)

NIP. 19570312 198601 1 001

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **EKHO JAMALUDDIN PUTERA NALOLE**

No. Pokok : B111 11 003

Bagian : Hukum Internasional

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Pelaksanaan
Hukuman Mati Bagi Warga Negara Asing di Indonesia
(Studi Kasus Eksekusi Mati terhadap Warga Negara
Asing pada Awal Masa Pemerintahan Presiden Joko
Widodo dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2016



Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003

ABSTRACT

EKHO JAMALUDDIN P. NALOLE (B 111 11 003). INTERNATIONAL LAW PREVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF THE DEATH PENALTY FOR THE FOREIGN NATIONALS. (Case study of the death penalty for the foreign nationals in the beginning of president Joko Widodo and vice president Muhammad Jusuf Kalla government) under supervised by **Abdul Maasba Magassing** as the First supervised and **Marthen Napang** as the second supervised.

The implementation of the death penalty in the beginning of president Joko Widodo and vice president Muhammad Jusuf Kalla government inflict pro and contra in society. This research purpose to find out the implementation of the death penalty to the foreign nationals. The implementation of the death penalty for the foreign nationals in Indonesia associated with the principle of state responsibility to the foreign nationals, that is of the fulfillment of rights for the foreign nationals death penalty convicts which sentenced to the death in Indonesia according to the standard treatment of the International law.

In this research, the writer used the library research in the center library of Hasanuddin university and in the library of law faculty of Hasanuddin university in Makassar, the data which found of this research was the secondary data which sourced from literatures and written data which have correlated with the problem statements of the research. The technique of collecting data was used the library review by reviewing and analyzing various literatures and another libraries research which have relevant with the problem statements. The data was analyzing by used the qualitative and presented in descriptive.

The result of the research showed that the death penalty sanctions in the positive law in Indonesia still go on, although there were many pro and contra that happened in the implementation and execution. The existed of the death penalty still deemed necessary although the implementation has been restricted in the International Law. In another side, the fulfillment of rights of the foreign nationals death penalty still implemented by the Indonesian government according to the standard treatment of the provision International law.

ABSTRAK

EKHO JAMALUDDIN P. NALOLE (B 111 11 003). TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PELAKSANAAN HUKUMAN MATI BAGI WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA. (Studi Kasus Eksekusi Mati Terhadap Warga Negara Asing pada awal masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla) Dibawah Bimbingan Abdul Maasba Magassing sebagai pembimbing I dan Marthen Napang sebagai pembimbing II.

Pelaksanaan Eksekusi Mati terhadap warga negara asing yang dilaksanakan pada awal masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla menimbulkan Pro dan Kontra dikalangan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi mati bagi warga negara asing di Indonesia dikaitkan dengan Prinsip Tanggungjawab Negara (*State Responsibility*) terhadap warga negara asing, yaitu pemenuhan hak – hak terhadap terpidana mati bagi warga negara asing yang dijatuhi sanksi hukuman mati di Indonesia berdasarkan standar perlakuan menurut Hukum Internasional.

Didalam penelitian ini penulis melakukan penelitian kepustakaan di perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin Makassar dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, data yang diperoleh merupakan data sekunder yang bersumber dari literatur dan bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang di bahas. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan yaitu dengan mengkaji dan menelaah berbagai literatur dan bahan pustaka lainnya yang relevan dengan permasalahan. Data dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi hukuman mati dalam sistem hukum positif di Indonesia masih tetap berlangsung, walaupun banyak terjadi pro dan kontra dalam hal penerapan dan pelaksanaannya. Keberadaan hukuman mati masih dianggap perlu meskipun penerapannya sudah dibatasi dalam hukum Internasional. Disisi lain pemenuhan hak-hak terpidana mati bagi terpidana mati warga negara asing tetap diterapkan oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan standar perlakuan menurut ketentuan hukum Internasional.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya yang senantiasa memberikan petunjuk dan membimbing langkah penulis sehingga dapat merampungkan skripsi ini sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang Studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Tak lupa pula penulis panjatkan shalawat dan salam bagi junjungan dan teladan Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabat beliau yang senantiasa menjadi penerang bagi kehidupan umat muslim di seluruh dunia.

Terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis dalam suka dan duka. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih yang sangat besar kepada seluruh pihak yang telah membantu baik moril maupun materiil demi terwujudnya skripsi ini.

Secara khusus dan dengan penuh rasa hormat penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Drs. Hamka Nalole dan Ibunda Iyam Dja'U yang telah banyak memberi kasih sayang, dukungan baik moril maupun materiil, nasihat, dan doa sehingga perkuliahan dan penyusunan skripsi ini dapat terlaksana dengan baik. Kepadamulah kupersembahkan karya ini.

Kepada saudara-saudaraku, Dwi Sufri Rachmat Putera Nalole, Tri Ilham Mohammad Putera Nalole, dan Rezki Catur Abdul Gani Putera Nalole, dan seluruh keluarga besar yang mungkin tidak bisa penulis sebutkan satu

persatu. Terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya, kalian semua adalah motivator penulis, jasa-jasa kalian sangat membantu dalam penyelesaian studi penulis.

Dengan segala hormat dan kerendahan hati, ucapan terimakasih yang tulus dan sebesar-besarnya penulis juga haturkan kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan Bapak Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Dr. Abd. Maasba Magassing, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan bapak Dr. Marthen Napang, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, terimakasih atas segala petunjuk, saran, bimbingan, dan waktu yang telah diluangkan untuk penulis.
5. Bapak Prof. Dr. S.M Noor, S.H., M.H., Ibu Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., MA.,LLM. dan Bapak Albert Lakollo, S.H., M.H. selaku dewan penguji yang telah memberikan masukan dan saran-saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Ketua dan Sekretaris Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

7. Segenap Guru Besar dan Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin untuk segala ilmu dan bimbingan yang telah diberikan selama proses perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan studi.
8. Bapak Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.H. selaku Penasihat Akademik penulis yang memberikan saran dalam setiap konsultasi Kartu Rencana Studi (KRS).
9. Seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan bantuan dalam pengurusan berkas kuliah hingga berkas ujian skripsi.
10. Staff Administrasi Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Nurhidayah, S.Hum. dan Kak Nurdin. terimakasih atas kesempatan yang diberikan untuk meminjam referensi yang dibutuhkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
11. Teman-teman angkatan 2011 (Mediasi) FH-UH, terimakasih telah banyak berbagi ilmu, pengalaman, dan persaudaraan.
12. Teman-teman seperjuangan di Asrama Mahasiswa (RAMSIS), Harry, Adi, Rizal, Adit, Marwan, Ikbil, dan lain-lain
13. Teman-teman KKN Reguler Gelombang 90 Desa Singa, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba. (Ibnu Sultan, Ikhsan, Ulfa, Dewi, dan Irena) maafkan saya sebagai KORDES selalu membuat kalian semua susah dan stress selama berada dilokasi KKN.
14. Bapak Kepala Desa Singa Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, Muh. Satria DM. Spd bersama Ibu, Kak Khairul dan Dirga.

Penulis menyadari keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki sehingga tidak menutup kemungkinan masih ditemukan adanya kekurangan, baik dari segi materi maupun dari segi teknik penulisannya. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan dalam bentuk kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca sekalian demi kesempurnaan penulisan dimasa yang akan datang.

Akhirnya harapan penulis, semoga skripsi ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Penulis,

Ekho Jamaluddin P. Nalole

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAK.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penulisan.....	11
D. Manfaat Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Sejarah Hukuman Mati.....	12
B. Mekanisme Pelaksanaan Hukuman Mati di beberapa negara.....	14
1. Amerika Serikat.....	14
2. Uni Eropa.....	14
3. Cina.....	16
4. Korea Utara.....	17
5. Arab Saudi.....	18
6. Malaysia.....	18
7. Indonesia.....	19
C. Pengaturan Warga Negara Asing dalam Hukum Internasional.....	22
1. Pengertian Warga Negara Asing.....	22
2. Individu Sebagai Subyek Internasional.....	24

3. Yuridiksi terhadap orang asing.....	26
4. Tanggungjawab negara terhadap orang asing.....	30
D. Tinjauan terhadap pelaksanaan Hukuman Mati.....	38
1. Hukuman Mati ditinjau dari segi Hukum Nasional suatu negara.....	38
2. Hukuman Mati ditinjau dari segi Instrumen Hukum Internasional.....	40
a. Hukuman Mati ditinjau dari Pasal 3 DUHAM.....	41
b. Hukuman Mati ditinjau dari Pasal 6 ICCPR.....	42
3. Hukuman Mati ditinjau dari Statuta-statuta Mahkamah Internasional....	44
a. <i>Nurenberg Tribunal</i>	45
b. ICTY dan ICTR.....	45
c. ICC (<i>International Criminal Court</i>).....	46
E. Hak-hak warga negara asing yang dijatuhi sanksi hukuman mati dalam hukum Internasional.....	47
BAB III METODE PENELITIAN.....	51
A. Lokasi Penelitian.....	51
B. Jenis dan Sumber Data.....	51
C. Teknik Pengumpulan Data.....	52
D. Analisa Data.....	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Tanggungjawab negara (<i>State Responsibility</i>) terhadap Pelaksanaan Hukuman mati bagi Warga Negara Asing di Indonesia.....	53
B. Standar perlakuan hukum Internasional dalam Pemenuhan Hak-hak terpidana mati bagi Warga Negara Asing di Indonesia.....	71
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	87

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1.</i> (daftar nama-nama terpidana mati yang telah dieksekusi oleh pemerintah Republik Indonesia dari tahun 2003-2015).	55
<i>Tabel 2.</i> (praktek negara-negara abolisi dan ritensionis terhadap pelaksanaan hukuman mati di dunia)	65
<i>Tabel 3.</i> (upaya hukum yang dilakukan oleh para terpidana mati, Data Ditjen Pemasyarakatan, per Desember 2011)	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum dan melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.¹

¹ Mansyur Effendi. 2005. *"Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)"*. Bogor : Ghalia Indonesia.hlm. 21

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.²

Hukum diciptakan untuk mengatur agar kepentingan-kepentingan yang berbeda antara pribadi, masyarakat, dan negara dapat dijamin dan diwujudkan tanpa merugikan pihak yang lain.³

Semua hubungan tersebut diatur oleh hukum, semuanya adalah hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*).⁴ Maka untuk itulah dalam mengatur hubungan-hubungan hukum pada masyarakat diadakan suatu kodifikasi hukum yang mempunyai tujuan luhur yaitu menciptakan kepastian hukum dan mempertahankan nilai keadilan dari substansi hukum tersebut. Sekalipun telah terkodifikasi, hukum tidaklah dapat bersifat statis karena hukum harus terus menyesuaikan diri dengan masyarakat, apalagi yang berkaitan dengan hukum publik karena bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak dan berlaku secara umum.

² *ibid*, hlm.23

³ Andi Hamzah, dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia dimasa lalu, kini dan dimasa depan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993), hlm.31

⁴ L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, P.T. Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hlm. 6.

Penerapan sanksi dalam penegakkan hukum untuk mengatur seseorang sebagai subjek hukum haruslah memiliki rasa pri kemanusiaan dalam menghargai harkat dan martabat hidup seseorang sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pembukaan (*preamble*) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Penerapan sanksi hukum sebagai akibat dari suatu pelanggaran Ketentuan Undang-Undang telah menciptakan perdebatan yang tidak kalah pelik sampai saat ini, Ketentuan hukum yang mengatur tentang penerapan hukuman mati telah memberikan gambaran bahwasannya komitmen Indonesia untuk tunduk pada kesepakatan internasional yang tertuang dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya belumlah memiliki kepastian yang jelas dimata dunia Internasional. Hukuman mati merupakan salah satu jenis cara penegakan sanksi hukum yang paling kontroversial didunia. Dari jaman Babilonia hingga saat ini, hukuman tersebut masih digunakan sebagai salah satu sanksi bagi mereka yang dituduh atau terbukti melakukan satu tindak kejahatan.

Dapat ditegaskan bahwa hukuman mati merupakan sebuah instrumen untuk melindungi masyarakat dan Negara baik dalam bentuk preventif maupun represif. Represif di sini bukanlah menjadikan mereka yang diperintah menjadi rentan dan lemah.⁵

⁵ Philip Nonet & Philip Selznick, *Hukum Responsif*, (Bandung: Nusamedia, 2007), hlm. 33

Indonesia merupakan salah satu Negara yang masih mempertahankan dan mengakui legalitas hukuman mati sebagai salah satu cara untuk menghukum pelaku tindak kejahatan, Di Indonesia sendiri ancaman hukuman mati berada di tingkat teratas ketika terkait dengan kasus narkoba, pembunuhan berencana, dan terorisme. Dalam situasi akhir-akhir ini, hukuman mati yang akan dijalankan pemerintah Indonesia yang melibatkan warga negara Asing sebagai pelaku kejahatan ialah terkait dengan kejahatan narkoba. Namun harus dipahami bahwa kategori kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime* seperti narkoba tidak dapat hanya dilihat dari satu sudut pandang saja. Bahkan Duta Besar Republik Indonesia untuk PBB di *New York* Desra Percaya dan menyatakan "Indonesia menghargai upaya Sekjen PBB untuk melakukan komunikasi langsung dengan pemerintah dari sipelaku kejahatan, namun menyayangkan sikapnya yang didasarkan pada pemahaman sempit dan sepihak,".⁶ Pemahaman sempit atau sepihak diartikan bahwa Sekjen PBB tidak melihat bahwa terdapat proses-proses yang telah dilewati melalui mekanisme hukum di Indonesia, baik dengan melihat dari bentuk kejahatan, maupun dampak buruk yang akan di timbulkan dari peristiwa kejahatan tersebut. Hukuman mati di Indonesia bukan merupakan *extrajudicial* atau *summary or arbitrary execution* yang melanggar norma HAM. Hukuman mati merupakan tindakan hukum formil yang telah diatur

⁶ OK.Mohd.Fajar Ikhsan, "Hukuman Mati : Antara Kedaulatan Hukum Dan Hubungan Antar Negara", <http://kabarmedan.com/hukuman-mati-antara-kedaulatan-hukum-dan-hubungan-antar-negara/>. di akses pada jam 06:20 WITA, tanggal 03-12-2015.

melalui *due process of law* dan penerapan langkah lainnya. Walaupun pro dan kontra mengenai hukuman mati sudah lama terjadi di negeri ini. Bahkan keberadaan hukuman mati di Indonesia akan terus berlangsung pada waktu yang akan datang karena dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), hukuman mati masih merupakan salah satu sanksi yang dipertahankan untuk menghukum pelaku kejahatan. Pengaturan Hukuman mati ditentukan sebagai salah satu pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif (Pasal 66 RUU KUHP tentang Pidana Mati dan tata cara pelaksanaan pidana mati yang diatur tersendiri dalam paragraf 11 Pasal 87 sampai dengan Pasal 90 RUU KUHP, serta terdapat ketentuan bahwa pelaksanaan hukuman mati tidak memiliki tenggang waktu kadaluarsa (Pasal 155 RUU KUHP).⁷

Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia menjadi bahan pembicaraan yang cukup aktual dan polemik yang berkepanjangan bagi negara-negara yang beradab. Hal ini didasari bahwa penerapan hukuman mati tidak sesuai dengan falsafah negara yang menganut paham Pancasila, yang selalu menjunjung tinggi rasa pri kemanusiaan yang adil dan beradab.

Dalam kenyataannya, penerapan hukuman mati apapun alasan dan logikanya tetap dilaksanakan di Indonesia dari berbagai kasus tindak kejahatan yang ada.⁸

⁷ Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) draft 4/9/2006

⁸ M. Zen Abdullah, *Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia telaah dalam konteks Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Ilmiah*, Universitas Jambi, 2009, hlm.61

Penerapan hukuman mati di Indonesia juga bertentangan dengan perkembangan peradaban bangsa-bangsa di dunia saat ini. *Amnesty Internasional*, mencatat hingga September 2007 ini, terdapat 142 negara dengan rata-rata penambahan 3 negara tiap tahun yang telah menghapuskan hukuman mati, baik melalui mekanisme hukum maupun praktek konkrit. Bahkan dari jumlah di atas, 24 negara memasukkan penghapusan hukuman mati di dalam konstitusinya. Wilayah yang negaranya paling aktif menghapus praktek hukuman mati adalah Afrika, yang memiliki kultur, sistem politik, dan struktur sosial yang mirip dengan Indonesia. Penghapusan hukuman mati baik melalui mekanisme hukum atau politik di Indonesia pasti meninggikan martabat Indonesia di mata komunitas internasional. Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, Asmara Nababan Mengemukakan, “Sudah saatnya esensi dari perubahan konstitusi ini diperdebatkan. Apa masih layak kita menghukum mati seseorang bila Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai hukum tertinggi Negara ini menegaskan bahwa hak untuk hidup tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”⁹

Timbulnya kontroversi mengenai hukuman mati juga diperdebatkan akibat adanya Amandemen Kedua Pasal 28 A dan Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang secara tegas menyatakan, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, sehingga semua produk hukum yang masih

⁹ http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=140.di akses pada jam 17:35 WITA, tanggal 01-12-2015

mencantumkan hukuman mati sebagai ancaman sanksi hukum harus diubah atau dibenahi.

Negara yang menghapus hukuman mati untuk seluruh kategori kejahatan berjumlah 91 negara, Negara yang menghapus hukuman mati untuk kategori kejahatan pidana biasa berjumlah 10 negara, Negara yang melakukan *moratorium* (*de facto* tidak menerapkan) praktek hukuman mati berjumlah 33 negara, Total negara yang melakukan abolisi (penghapusan) terhadap hukuman mati berjumlah 134, dan Negara yang masih menerapkan praktek hukuman mati (*ritensionis*).¹⁰ Sebagian menghapus dari sistem hukum positifnya karena ada pengertian yang lebih luas tentang arti hak asasi manusia. Seorang hakim *Constitutional Court* di Afrika Selatan melarang pelaksanaan hukuman mati dalam konstitusi baru dan menyebut hak atas hidup sebagai hak-hak yang paling terpenting dari semua hak asasi manusia dan ini harus ditunjukkan oleh negara dalam semua tindakannya termasuk cara menghukum terpidana. Sebaliknya ada juga Negara yang pernah menghapus dan memberlakukan lagi seperti Filipina, Nepal, Papua Nugini, dan Rusia.¹¹

Dalam lingkup masyarakat internasional, pengakuan terhadap hukuman mati hampir tidak mempunyai tempat pada masyarakat yang demokratis dan berbudaya. Komisi PBB memberikan tanggapannya sebagai berikut:

¹⁰ Amnesty International (Desember 2007)

¹¹ Randy Piangga Basuki Putra, 2012: "*Penerapan Pidana Mati dalam Sistem Hukum Indonesia*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", Jawa Timur, hlm.8

“Walaupun hukuman mati belumlah dilarang berdasar hukum internasional, kecenderungan terhadap pelarangan tersebut sangatlah jelas. Diadopsinya Opsional Kedua Kovenan Internasional terhadap Hak Sipil dan Politik tahun 1989 yang bertujuan untuk menghapuskan hukuman mati merupakan pengakuan yang sangat jelas oleh masyarakat internasional terhadap kebutuhan untuk menghilangkan penggunaan pidana mati secara total dan keseluruhan.”¹²

Hak atas penghidupan tidak dijamin sebagai hak mutlak. Misalnya, menurut Konvensi Eropa, pencabutan nyawa tidak bertentangan dengan hak atas penghidupan, apabila pencabutan ini diakibatkan oleh tindakan tertentu yang sudah ditetapkan. Dalam beberapa instrumen, larangan hukuman mati dimuat dalam sebuah Protokol tersendiri.

Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Politik dan Konvensi Amerika keduanya membatasi hukuman mati pada “kejahatan yang paling berat”, dikenakan pada suatu “keputusan final suatu pengadilan yang berwenang” sesuai dengan undang-undang yang tidak retroaktif. Kedua perjanjian ini memberikan hak untuk mencari “pengampunan atau keringanan hukuman” dan melarang pengenaan hukuman mati pada orang dibawah usia delapan belas tahun pada saat melakukan kejahatan, dan melarang eksekusinya pada wanita hamil. Konvensi Eropa mensyaratkan hukuman mati dikenakan oleh suatu pengadilan, sesudah memperoleh keyakinan mengenai suatu kejahatan yang karena keputusannya ditetapkan oleh undang-undang.

¹² <http://jurnalhukum.blangspot.com/2007/05/penelitian-hukum-hukuman-mati-dan-hak.html>. di akses pada jam 17:35 WITA, Tanggal 03-12-2015.

Dengan semakin berkembangnya kebebasan berpendapat di Indonesia, maka sedikit banyak muncul persepsi yang berbeda mengenai eksistensi hukuman mati di Indonesia. Ada beberapa kalangan yang setuju dengan pelaksanaan hukuman mati, karena berpendapat hukuman mati bisa menimbulkan efek jera, sehingga seseorang akan berpikir ulang untuk melakukan kejahatan atau perbuatan serupa. Tetapi ternyata banyak juga orang berpendapat, bahwa pelaksanaan hukuman mati adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia, sehingga penghapusan (*abolisi*) Hukuman Mati dari sistem hukum di Indonesia harus segera mungkin dilakukan.¹³

Setiap negara wajib melindungi warga negara yang diatur dalam hukum internasional yang merupakan bentuk *diplomatic protection*. Namun setiap negara juga wajib mematuhi dan menghargai Undang-Undang negara lain. Tidak ada satupun kepala negara yang tidak melindungi warga negaranya (*State Responsibility*) di negara lain apalagi warga negara yang akan dijatuhi hukum mati. Berdasarkan hukum Internasional, hukuman mati hanya bisa diterapkan pada jenis kejahatan paling serius yakni seperti halnya Genosida, terorisme dan kejahatan terhadap kemanusiaan lainnya.

Keberadaan hukuman mati bukan hanya menjadi sebuah permasalahan yang terjadi di Indonesia namun juga terjadi di banyak

¹³ Tim Kerja Di Bawah Pimpinan Andi Hamzah, *Perumusan Harmonisasi Hukum Bidang Penyerasian KUHP dengan KUHP Baru*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 1998/1999, hlm. 92

Negara lainnya. Hal ini dapat dilihat dari pendapat Von Henting yang secara terang-terangan menolak mengenai keberadaan lembaga pidana mati. Beliau berpendapat, ada pengaruh yang kriminogen dari pada hukuman mati ini terutama disebabkan karena Negara telah memberikan suatu contoh yang buruk dengan pemberlakuan hukuman mati tersebut sebenarnya Negaralah yang berkewajiban untuk mempertahankan nyawa manusia, dalam keadaan yang bagaimanapun.¹⁴

Berdasarkan uraian diatas, dalam hal ini penulis akan mengkaji

TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PELAKSANAAN HUKUMAN MATI BAGI WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA.

(studi kasus eksekusi mati terhadap warga negara asing pada awal masa pemerintahan presiden Joko Widodo dan wakil presiden Muhammad Jusuf Kalla)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, untuk memfokuskan penulisan skripsi ini maka rumusan masalah yang akan di bahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah prinsip Tanggungjawab Negara (*State Responsibility*) terhadap pelaksanaan hukuman mati bagi Warga Negara Asing di Indonesia?.

¹⁴ Djoko Prakoso & Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm.12

2. Apakah Pemenuhan hak-hak terhadap terpidana mati bagi Warga Negara Asing di Indonesia telah sesuai dengan standar perlakuan menurut ketentuan Hukum Internasional ?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui prinsip Tanggungjawab Negara (*State Responsibility*) terhadap pelaksanaan hukuman mati bagi warga negara asing di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pemenuhan hak-hak terhadap terpidana mati bagi warga negara asing di Indonesia telah sesuai dengan standar perlakuan menurut ketentuan Hukum Internasional.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat penelitian dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Secara Akademis/Teoritis

Diharapkan penulisan skripsi ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam membangun dan mengembangkan hukum internasional khususnya di bidang penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) secara nasional maupun Internasional.

2. Secara Praktis

Dapat memberikan masukan bagi pemerintah, penegak hukum maupun masyarakat dalam hal penegakkan Hak Asasi Manusia khususnya dalam penerapan sanksi hukuman mati di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah Hukuman Mati

Hukuman mati merupakan praktik yang wajar di Eropa pada abad 16-17. Seorang pelaku kejahatan dibawa keruang terbuka untuk dieksekusi dihadapan raja. Namun, seiring dengan berkembangnya zaman, praktik hukuman mati mengalami transformasi. Hukuman mati ditinggalkan dan digantikan dengan pemenjaraan dan pendisiplinan melalui berbagai kerja rutin yang diawasi secara terus menerus.

Hukuman mati resmi diakui bersamaan dengan adanya hukum tertulis, yakni sejak adanya undang-undang Raja Hamurabi di Babilonia pada abad ke-18 Sebelum Masehi. Saat itu ada ada 25 macam kejahatan yang diancam dengan hukuman mati”

Awal hukuman mati diidentifikasi terjadi sekitar abad ke 18 dalam masa kerajaan Hammaurabi di babel. Hukuman mati pada masa ini ditetapkan untuk 25 kategori kejahatan yang berbeda. Tetapi sebelum itu, hukuman mati ini juga sebenarnya sudah ada sejak abad ke 14 yang terjadi di Athena. Hukuman mati pada masa ini dilaksanakan untuk semua pelanggaran maupun tindak kejahatan. Hukuman mati juga berlaku pada masa kekaisaran Romawi yang terjadi sekitar abad ke 12 yang dimana praktik hukuman mati dilakukan dengan berbagai cara seperti penyaliban,

ditenggelamkan, dipukuli sampai mati, dibakar hidup-hidup dan dilempari sampai mati.

Perjalan hukuman mati ini termasuk sudah mengalami zaman yang panjang dan berbeda. Sekitar tahun 1066 Raja William atau biasa disebut sebagai William Sang Penakluk (Normandia, Perancis) menghapus istilah hukuman mati (pada masa itu berlaku hukuman gantung) untuk kategori kejahatan apapun namun terkecuali untuk para penjahat perang. Namun tren ini tidak bertahan lama karena pada abad ke 16 dibawah pemerintahan raja Henry VIII, sebanyak 72.000 orang diperkirakan telah dieksekusi dengan berbagai bentuk kejahatan. Beberapa metode hukuman mati pada masa tersebut dilakukan dengan berbagai cara antara lain dibakar di tiang, digantung, pemenggalan, dan *quartering*. Kebanyakan eksekusi dilakukan karena alasan pelanggaran modal & pajak, tidak mengakui kejahatan, dan pengkhianat kerajaan.

Sementara di Inggris, pada tahun 1700-an telah terjadi 222 pelaku kejahatan yang siap untuk dihukum mati. Kebanyakan para pelaku kejahatan tersebut telah melakukan tindakan seperti mencuri dan menebang pohon. Karena banyaknya pelaku yang akan dieksekusi, pihak juri melakukan klarifikasi ulang dengan mempertimbangkan kejahatan berat dan ringan hingga pada akhirnya sekitar 100 pelaku yang akhirnya jadi dieksekusi.

B. Mekanisme Pelaksanaan Hukuman Mati di beberapa negara

1. Amerika Serikat

Amerika Serikat menerapkan 5 macam pelaksanaan eksekusi mati yaitu suntik mati sebagai cara hukuman mati yang paling banyak digunakan oleh 35 negara bagian dan Pemerintah Amerika Serikat, selanjutnya kursi listrik, kamar gas, gantung dan tembak mati. Suntik mati telah dilakukan pada terpidana 1187 orang, kursi listrik 158 orang, kamar gas 11 orang, gantung 3 orang, dan tembak mati sebanyak 3 orang.¹⁵

2. Uni Eropa

Negara-negara Uni Eropa memang sudah tidak lagi menerapkan praktik hukuman mati. Negara anggota Uni Eropa yang terakhir mempraktikkan hukuman mati adalah Latvia, yang pada tahun 2012 melakukan eksekusi terakhir.

Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan Federica Mogherini menyatakan bahwa Uni Eropa menentang hukuman mati untuk semua jenis kasus dan tanpa pengecualian, dan secara konsisten menyerukan penghapusan (abolisi) hukuman mati secara universal. Hukuman mati adalah pidana yang kejam

¹⁵ <http://www.deathpenaltyinfo.org/documents/FactSheet.pdf>. di akses pada jam 10:22 WITA, Tanggal 27-11-2015.

dan tidak manusiawi, yang gagal untuk memberikan efek jera dan yang sangat merendahkan martabat dan integritas manusia.

Beberapa jenis mekanisme hukuman mati yang pernah diberlakukan di beberapa negara - negara eropa:

1. Garrote

Hukuman mati ini dilakukan dengan cara dicekik dengan menggunakan alat yang terbuat dari besi. Bentuknya berupa tempat duduk dimana bagian sandaran atasnya dipasang alat yang nantinya akan diputar untuk mematahkan atau mencekik leher si pelaku hingga mati. Hukuman mati seperti ini pernah diterapkan di negara Spanyol dan Andora.

2. Breaking Wheel

Hukuman mati semacam ini biasa disebut juga roda maut. Dimana pelakunya akan diikat disebuah roda lalu diputar. Kemudian algojo yang ditugaskan untuk mengeksekusi akan memukulnya dengan menggunakan sebuah alat pemukul. Hukuman ini akan terus dilakukan hingga pelakunya meninggal. Penerapan hukuman ini pernah diterapkan di pertengahan abad ke-19 di eropa. Dan biasanya hukuman mati dikala itu diterapkan kepada para budak yang memberontak.

3. Drawing and Quartering

Hukuman mati satu terbilang sangat sadis, dimana para pelaku akan mengalami penyiksaan yang panjang dan berat. Dia akan diseret dengan menggunakan kuda untuk menuju tempat eksekusi. Kemudian digantung hingga sekarat, tapi masih dibiarkan hidup. Setelah itu pelaku mendapatkan siksaan lagi dengan dipotong-potong menjadi empat bagian. Penerapan hukuman mati ini pernah terjadi dan diterapkan di Inggris pada tahun 1351 sampai abad ke-19.

3. Cina

Terdapat 2 metode pelaksanaan eksekusi mati yang diberlakukan di Cina, yaitu :

1. Hukuman Mati dengan cara Suntik Mati/*Lethal Injection*

Hukuman suntik mati atau *Lethal Injection* dilakukan melalui tiga tahapan. Tahap pertama adalah memberikan suntikan untuk anasthesi (pembiusan). Tahap kedua adalah memberikan suntikan untuk melumpuhkan tubuh dan menghentikan pernafasan. Tahap ketiga atau terakhir adalah memberikan suntikan untuk menghentikan detak jantung. Tanpa Anastesi, terdakwa akan mengalami asfiksiasi, sensasi terbakar pada seluruh tubuh, nyeri pada seluruh otot, dan akhirnya berhentinya detak jantung. Oleh karena itu, anastesi yang memadai diperlukan untuk meminimalisir penderitaan dari terdakwa dan untuk memperkuat opini publik bahwa hukuman suntik mati itu relatif bebas rasa sakit. Dan disinilah polemik mengemuka. Guna mendukung kelangsungan proses

euthanasia yang baik dan benar hanya dapat dilakukan oleh pihak yang memiliki kompetensi kapasitas pengetahuan medis yang layak.

2. Hukuman Mati dengan cara ditembak mati

Tembak mati yang dalam pelaksanaannya diarahkan tepat ke jantung si terpidana yang sebelumnya telah disandarkan pada sebuah tiang dengan keadaan kedua tangannya telah diikat serta mata ditutupi oleh sebuah kain hitam. pelaksanaannya dilakukan oleh beberapa regu penembak yang masing-masing regu dipimpin oleh komandan regu.

4. Korea Utara

Berikut beberapa metode hukuman mati yang kerap digunakan di Korea Utara pada masa pemerintahan Kim Jong Un.¹⁶

1. Ditembak pasukan bersenjata mesin
2. Eksekusi mati dengan cara diracun
3. Dibakar hidup-hidup
4. Ditembak mortir

¹⁶ <http://serojanews.blogspot.co.id/2015/05/inilah-beberapa-cara-eksekusi-hukuman.html>. di akses pada jam 06:15 WITA, Tanggal 08-12-2015.

5. Arab Saudi

Metode penerapan hukuman mati yang diberlakukan di Arab Saudi yakni melakukan pemotongan atau pemenggalan (hukum pancung) kepala di bagian leher untuk memisahkannya dari tubuh siterpidana. Dengan hukuman jenis ini, korban lebih cepat meninggal kurang dari 8 detik. Beheading atau pemenggalan kepala, di beberapa negara yang mematuhi hukum Syari'ah Islam, merupakan metode eksekusi yang umum digunakan.¹⁷

6. Malaysia

Mekanisme pelaksanaan hukuman mati yang diberlakukan dinegeri Jiran Malaysia yakni dengan cara siterpidana dihukum gantung dengan mengikatkan seutas tali di leher terpidana setelah itu papan yang digunakan sebagai pijakan siterpidana ditarik atau dilepaskan sehingga aliran darah dan oksigen yang menuju ke otak si terpidana terhambat oleh cekikan tali tersebut dan waktu atau lamanya proses menuju kematian dalam penggunaan hukuman mati ini membutuhkan waktu kurang lebih 5 menit.

¹⁷ <http://segala.info.com/5-jenis-hukuman-mati-yang-paling-cepat/>. di akses pada jam 06:30 WITA, Tanggal 08-12-2015.

7. Indonesia

Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 2/PNPS/1964 Bab I Pasal 1 disebutkan, di lingkup peradilan umum atau peradilan militer, pelaksanaan hukuman mati dilakukan dengan cara ditembak sampai mati.

Pada Pasal 10 disebutkan eksekutor yang ditunjuk adalah satu bintara, 12 orang tamtama, dan di bawah pimpinan seorang perwira. Semuanya berasal dari Brigade Mobile (Brimob).

Berikut beberapa tata cara pelaksanaan hukuman mati sebelum terpidana dieksekusi :

1. Kepala Polisi Komisariat Daerah (Kapolda) akan menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati, setelah mendengar nasehat jaksa tinggi/jaksa yang bertanggungjawab untuk melaksanakan eksekusi.
2. Kepala Polisi Komisariat Daerah bertanggungjawab atas keamanan dan ketertiban sewaktu pelaksanaan pidana mati dan menyediakan tenaga-tenaga serta alat-alat yang diperlukan.
3. Menunggu pelaksanaan pidana mati, terpidana ditahan dalam penjara atau di tempat lain yang khusus ditunjuk oleh jaksa tinggi/jaksa.

4. Tiga kali dua puluh empat jam sebelum eksekusi dilakukan, jaksa tinggi/jaksa akan memberitahukan kepada terpidana tentang rencana hukuman mati.
5. Apabila terpidana hendak mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya bisa disampaikan kepada jaksa tinggi/jaksa.
6. Apabila terpidana hamil, maka pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan empat puluh hari setelah anaknya dilahirkan.
7. Pembela terpidana, atas permintaannya sendiri atau atas permintaan terpidana, dapat menghadiri pelaksanaan pidana mati.
8. Kepala Polisi Daerah membentuk suatu regu penembak dari brigade mobile (Brimob) yang terdiri dari seorang bintara, 12 orang tamtama, di bawah pimpinan seorang perwira.
9. Terpidana dibawa ketempat pelaksanaan pidana dengan pengawalan polisi yang cukup.
10. Jika diminta, terpidana dapat disertai seorang perawat rohani.
11. Setiba di tempat pelaksanaan pidana mati, komandan pengawal menutup mata terpidana dengan sehelai kain, kecuali terpidana tidak menghendakinya.
12. Terpidana dapat menjalani pidana secara berdiri, duduk atau berlutut.

13. Jika dipandang perlu, jaksa tinggi/jaksa yang bertanggungjawab dapat memerintahkan supaya terpidana diikat tangan serta kakinya ataupun diikat di sandaran yang khusus dibuat untuk itu.
14. Setelah terpidana siap ditembak, regu penembak dengan senjata sudah terisi menuju ke tempat yang ditentukan oleh jaksa tinggi/jaksa.
15. Jarak antara titik di mana terpidana berada dan tempat regu penembak tidak boleh melebihi 10 meter dan tidak boleh kurang dari 5 meter.
16. Komandan regu penembak dengan menggunakan pedang memberikan isyarat, dan memerintahkan anggotanya membidik jantung terpidana.
17. Apabila setelah penembakan, terpidana masih memperlihatkan tanda-tanda bahwa ia belum mati, maka komandan regu segera memerintahkan kepada bintara regu penembak untuk melepaskan tembakan pengakhir dengan menekankan ujung laras senjatanya pada kepala terpidana tepat di atas telinganya.
18. Penguburan diserahkan kepada keluarganya atau sahabat terpidana, kecuali jika berdasarkan kepentingan umum jaksa tinggi/jaksa yang bertanggungjawab memutuskan lain.

C. Pengaturan Warga Negara Asing dalam Hukum Internasional

1. Pengertian Warga Negara Asing

Individu yang bertempat tinggal dalam suatu negara berupa warga negara dan bukan warga negara. Orang yang bukan warga negara ini disebut sebagai orang asing. Untuk menentukan seseorang penduduk adalah warga negara atau bukan, hal tersebut diatur oleh hukum nasional dari masing-masing negara. Dalam hukum nasionalnya akan ditentukan siapa saja termasuk warga negaranya dan yang bukan. Meskipun masing-masing negara berwenang menentukan peraturan kewarganegaraannya yang diberlakukan dalam wilayah negara itu, tetapi negara tersebut juga harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum internasional yang terdapat dalam perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional dan azas-azas umum hukum internasional mengenai kewarganegaraan.¹⁸ Menurut J.G. Starke, arti penting status kewarganegaraan (*Nationality*) seseorang bagi hukum internasional adalah dalam hal :

1. Pemberian hak perlindungan diplomatik di luar negeri. Setiap negara berhak melindungi warga negaranya di luar negeri.
2. Negara yang menjadi kebangsaan seseorang tertentu akan bertanggungjawab kepada negara lain apabila negara itu melalaikan kewajibannya mencegah tindakan-tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan atau negara tersebut tidak menghukumnya, setelah tindakan melanggar hukum itu dilakukan.

¹⁸ Yudha Bhakti Ardhiwisasta, *Hukum Internasional Bunga Rampai*, Alumni, Bandung 2003.hlm.9-10

3. Secara umum, suatu negara tidak boleh menolak atau menerima kembali warganegaraanya sendiri di wilayahnya.
4. Nasionalitas berhubungan erat dengan kesetiaan, dan salah satu hak utama dari kesetiaan adalah kewajiban untuk dinas militer di negara terhadap mana kesetiaan itu di baktikan.
5. Suatu negara mempunyai hak luas, kecuali adanya traktat khusus yang mengikatnya untuk melakukan hak itu, untuk menolak pengekstradisian warganya kepada negara lain yang meminta penyerahannya.
6. Status musuh dalam perang dapat ditentukan oleh nasionalitas orang tersebut.
7. Suatu negara melaksanakan yurisdiksi pidana dan yurisdiksi lainnya berdasarkan nasionalitas seseorang.¹⁹

Sangatlah penting untuk terlebih dahulu menentukan status kewarganegaraan seseorang supaya tidak timbul keragu-raguan dalam penerapan hukum kepadanya. Apabila timbul keragu-raguan, maka aturan hukum yang dipergunakan adalah hukum nasional setempat yang diakui oleh orang tersebut atau hukum yang berlaku di negara yang diduga menjadi kebangsaan orang tersebut, demikian pendapat Russell J dalam perkara *Stoeck v Public Trustee*, sebagai berikut : ” Persoalan dari negara mana seseorang berasal pada akhirnya harus diputuskan oleh hukum nasional setempat dari negara yang diklaim oleh orang itu

¹⁹ J.G. Starke, *Hukum Internasional* 2, Sinar Grafika 2003.hlm.459

sebagai negaranya atau yang diduga sebagai negaranya ” . Prinsip tersebut sesuai pula dengan pasal 1 dan 2 *The Hague Convention on the Conflict of Nationality Law* 1930, menyatakan sebagai berikut :

Pasal 1

“Setiap negara untuk menentukan menurut haknya sendiri tentang siapa yang merupakan warganegaranya . Hukum ini harus diakui oleh negara-negara lain sejauh hal tersebut konsisten dengan konvensi-konvensi internasional, kebiasaan internasional dan prinsip-prinsip hukum yang umumnya diakui berkenaan dengan nasionalitas”.

Pasal 2 :

*“Setiap persoalan mengenai apakah seseorang yang berkewarganegaraan suatu negara harus ditentukan sesuai dengan hukum dari negara tersebut”.*²⁰

Dalam membahas persoalan perlindungan hukum internasional terhadap orang asing ini digunakan pendekatan doktrinal dan praktek pengadilan internasional. Dari pendapat para ahli hukum internasional, akan ditemukan asas-asas dan teori-teori hukum mengenai kedudukan individu sebagai subyek hukum internasional. Asas-asas kewarganegaraan sebagai dasar utama pemberlakuan azas yurisdiksi dan tanggung jawab negara terhadap warga negaranya dan orang asing.

2. Individu sebagai Subyek Hukum Internasional

Kedudukan seorang individu sebagai warga negara atau orang asing, ia adalah subyek hukum internasional, yang memiliki hak dan kewajiban menurut hukum internasional dalam arti yang terbatas. Dalam

²⁰ *ibid.*, hlm. 460-461

arti terbatas ini sebagai kebalikan dari pengertian negara sebagai subyek hukum internasional dalam arti penuh. Pandangan ini didasarkan pada konsep teoritis bahwa hanya negara sebagai subyek hukum, dan individu memiliki hak dan kewajiban tertentu melalui negara yang menjadi peserta suatu konvensi, seperti pada Konvensi Palang Merah Tahun 1949.²¹ Dengan meminjam istilah dari Prof. Nguyen Quoc Din, bahwa individu adalah subyek hukum internasional buatan, karena kehendak negaralah, yang dirumuskan dalam ketentuan-ketentuan konvensional, yang menjadikan individu dalam hal-hal tertentu sebagai subyek hukum internasional.²²

Dalam perkembangannya, kedudukan individu sebagai subyek hukum internasional menjadi penting dan paham mengenai hanya negara sebagai subyek hukum internasional mulai ditinggalkan, seperti dalam kasus *Danzig Railway Officials Case*, Mahkamah Internasional mengeluarkan keputusan dalam diktumnya yang bersifat umum berpendapat bahwa :

“Apabila suatu perjanjian internasional memberikan hak tertentu kepada orang perorangan, hak itu harus diakui dan mempunyai daya laku dalam hukum internasional, artinya diakui oleh badan peradilan internasional”. Demikian pula dengan adanya peradilan di Nuremberg dan Tokyo dalam mengadili para pelaku kejahatan perang, dalam hal mana para pelaku kejahatan bertanggungjawab secara individu atas kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan, dan tidak dapat berlindung pada negaranya.

²¹ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*. P.T. Alumni., Bandung, hlm .101

²² Boer Mauna, *Hukum Internasional Peranan, Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung 2003. hlm. 594

3. Yurisdiksi Negara Terhadap Orang Asing

Praktek pelaksanaan yurisdiksi oleh beberapa negara yang diberlakukan terhadap orang, harta bendanya, tindakan atau peristiwa, berbeda-beda dan perbedaan itu disebabkan oleh faktor-faktor historis dan geografis suatu negara.²³

Dalam hukum Internasional dikenal beberapa prinsip-prinsip yurisdiksi :

1. Yurisdiksi teritorial, pelaksanaan yurisdiksi teritorial oleh suatu negara terhadap harta benda, orang, tindakan dan peristiwa yang terjadi dalam wilayah suatu negara diakui oleh hukum internasional untuk semua negara anggota masyarakat internasional. Menurut pasal 9 Konvensi Montevideo Tahun 1933, bahwa :

“The jurisdiction of states within the limits of national territory applies to all the inhabitants.”

Berlakunya yurisdiksi teritorial suatu negara adalah dalam batas-batas wilayahnya, dan akan tetap melekat padanya karena negara tersebut berdaulat. Termasuk pula teritorial suatu negara adalah jalur pantai maritim atau laut teritorial, kapal yang berbendera dari suatu negara tertentu, dan pelabuhan-pelabuhan. Perluasan pengertian yurisdiksi teritorial adalah prinsip teritorial subyektif dan prinsip teritorial objektif. Yang dimaksud prinsip teritorial subyektif adalah suatu negara menjalankan yurisdiksinya untuk menuntut

²³ J. G. Starke, *Hukum Internasional* 1, Sinar Grafika 2001.hlm. 269

dan menghukum perbuatan pidana yang dilakukan di wilayah negaranya, tetapi perbuatan itu diselesaikan di wilayah negara lain . Penerapan prinsip ini belum berlaku umum dalam praktek internasional tetapi dimasukan dalam pada *Geneva Convention for Suppression of Cunterfeiting Currency 1929* dan *Geneva Convention for Suppression of the Illicit Traffic Drug Tahun 1939*. Sedangkan dalam teritorial obyektif, maka suatu negara tertentu dapat menerapkan yurisdiksi obyektif , apabila suatu perbuatan pidana atau perbuatan lainnya yang dilakukan di negara lain tetapi dilaksanakan atau diselesaikan di dalam wilayah negara mereka, atau perbuatan itu menimbulkan akibat yang sangat berbahaya bagi ketertiban sosial dan ekonomi di wilayah negara mereka. Prinsip ini dianut pula pada dua konvensi tersebut diatas dan diakui dalam keputusan-keputusan pengadilan di Amerika Serikat, Inggris dan Jerman. Selain itu juga diakui yurisdiksi teritorial terhadap orang asing, dengan mengutip pendapat Hakim J.B. Moore dalam Lotus Case, antara lain menyatakan :

“Tidak ada anggapan imunitas yang muncul dari fakta bahwa orang yang dikenai perkara itu orang asing; seorang asing tidak dapat menuntut pembebasan dari pelaksanaan yurisdiksi demikian kecuali sejauh orang itu dapat memperlihatkan hal-hal berikut : Karena alasan imunitas khusus, ia tidak tunduk pada hukum lokal atau hukum lokal itu tidak sesuai dengan hukum internasional”.²⁴

Pengecualian dari pelaksanaan yurisdiksi teritorial ini adalah : terhadap kepala negara asing, perwakilan dan konsul asing, kapal

²⁴ *ibid.* hlm. 277

milik asing, dan angkatan bersenjata milik asing, lembaga internasional.

2. Yurisdiksi individu, penerapan yurisdiksi ini tergantung pada pelaku individunya yang terlibat dalam peristiwa hukum tertentu, bukan pada aspek teritorial suatu negara. Dalam praktek internasional, yurisdiksi individu ini diberlakukan menurut prinsip-prinsip nasionalitas aktif dan nasionalitas pasif. Menurut prinsip nasionalitas aktif, maka negara dapat melaksanakan yurisdiksi terhadap semua warga negaranya, sedangkan menurut prinsip nasionalitas pasif, maka negara dapat menjalankan yurisdiksinya apabila seorang warga negara menderita kerugian. Hukum internasional mengakui prinsip ini dengan pembatasan tertentu, seperti dalam *Cutting Case*, dimana negara yang tidak mengakui prinsip ini juga tidak wajib memberikan pengakuan terhadap peradilan yang dilaksanakan oleh negara lain terhadap warga negaranya. Dasar pembenaran terhadap prinsip nasionalitas pasif adalah setiap negara berhak melindungi warga negaranya di luar negeri dan apabila negara teritorial dimana tindak pidana itu terjadi tidak menghukum orang yang menyebabkan kerugian tersebut, maka negara asal korban berwenang terhadap tindak pidana itu, apabila orang tersebut berada dalam wilayahnya.
3. Yurisdiksi menurut prinsip perlindungan, setiap negara berwenang melaksanakan yurisdiksinya terhadap kejahatan yang menyangkut

keamanan, integritas dan kepentingan ekonomi yang vital, dengan alasan-alasan bahwa akibat tindak pidana itu sangat besar bagi negara yang dimaksud dan apabila yurisdiksi itu tidak dilaksanakan maka pelakunya akan lolos dari penghukuman karena tidak melanggar hukum lokal atau ekstradisi ditolak dengan alasan tindak pidana bersifat politis. Seperti misalnya praktek pengadilan di Inggris dalam Kasus Joyce V DPP, Majelis Tinggi berpendapat bahwa "seorang asing yang mengkhianati Mahkota dapat di hukum meskipun dilakukan di luar negeri".

4. Yurisdiksi menurut prinsip-prinsip universal. Suatu tindak pidana yang tunduk pada yurisdiksi universal ini adalah tindak pidana yang berada dalam di bawah yurisdiksi semua negara dimanapun tindak pidana itu dilakukan. Tindak pidana *jure gentium* dan semua negara berhak untuk menangkap dan menghukum para pelakunya, contohnya kejahatan perompakan dan kejahatan perang.

Seorang asing berhak atas perlindungan yang sama berdasarkan undang-undang negara tempat ia berada dan berhak pula atas hak-hak tertentu untuk memberikan kemungkinan kepadanya hidup secara layak, seperti diatur pada pasal 9 Konvensi Montevideo Tahun 1933, yang menyatakan: "*Nationals and foreigners are under the same protection of law and the national authorities and the foreigners may not claim right other or more than those of nationals*"

Terlepas dari perlindungan yang sama atas hak-hak orang asing berdasarkan peraturan perundang-undangan tuan rumah dihadapan pengadilan, tetapi hukum internasional tidak melarang suatu negara mengadakan perlakuan yang berbeda yang lebih mengutamakan pada warga negaranya sendiri dari pada orang asing. Pada umumnya tidak semua orang asing mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Orang asing penempat mempunyai hak dan kewajiban yang lebih besar dibandingkan dengan mereka yang berada di wilayah suatu negara sementara, seperti turis asing.²⁵

4. Tanggungjawab Suatu Negara Terhadap Orang Asing

Pada dasarnya hak dan kewajiban negara terhadap warga, baik warga negara maupun orang asing, ditentukan oleh negara tersebut dan kewarganegaraan dari orang yang bersangkutan. Setiap orang tersebut tunduk pada kekuasaan negara dan harus mentaati hukum yang berlaku di wilayah negara tersebut, terkecuali bagi orang asing dengan pembatasan-pembatasan tertentu, seperti dalam hak politik, jabatan dalam pemerintahan. Kewarganegaraan seseorang berhubungan erat dengan negaranya, karena menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal - balik. Negara wajib melindungi warga negaranya di manapun berada, dan setiap warga negara tetap tunduk atas kekuasaan negaranya serta mentaati hukum yang berlaku di negaranya. Bagi warga negaranya yang berada di luar negeri, berlakunya kekuasaan negara dan aturan

²⁵ Yudha Bhakti Ardhiwisasta, 2003. *op.cit.*, hlm.19

hukum baginya, dibatasi oleh kekuasaan dan hukum negara dimana ia berada.²⁶ Praktek negara-negara dalam memperlakukan orang asing yang berada di wilayah negaranya selalu disertai dengan pembatasan-pembatasan tertentu, seperti dalam bidang perpajakan, hak untuk pekerjaan tertentu, tempat tinggal, kepemilikan harta benda, *privilege* dan imunitas sipil dan keimigrasian.

Dalam doktrin hukum internasional terdapat beberapa pendapat berkenaan dengan masuknya orang asing pada wilayah suatu negara :

1. Suatu negara wajib memberikan ijin kepada semua orang asing.
2. Suatu negara wajib memberikan ijin kepada semua orang asing, dengan syarat bahwa negara tersebut boleh menolak golongan-golongan tertentu, misalnya pecandu obat bius, orang mengidap penyakit berbahaya .
3. Suatu negara terikat untuk mengijinkan orang asing masuk tetapi dengan mengenakan syarat-syarat pada ijin masuk.
4. Suatu negara sepenuhnya berhak melarang semua orang asing menurut kehendaknya.

Praktek negara-negara dalam hal pemberian ijin masuk orang asing di wilayah negaranya, selalu disertai dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang diatur dalam hukum nasional masing-masing negara. Tindakan ini sesuai dengan pencerminan dari prinsip kedaulatan negara yang dianut oleh suatu negara, bahkan praktek pengadilan di

²⁶ F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Penerbit Univ. Atmajaya, Yogyakarta, 1998 hlm. 42

Amerika dan Inggris menegaskan bahwa larangan masuk orang asing yang dilakukan oleh suatu negara sebagai suatu peristiwa kedaulatan teritorial. Pengecualian terhadap larangan masuk orang asing ke wilayah suatu negara, dapat ditentukan dalam perjanjian internasional yang mengikat bagi negara-negara tersebut. Dalam hukum internasional sendiri tidak mempunyai kewajiban untuk mengizinkan masuknya orang asing secara bebas dan tidak menetapkan jangka waktu tertentu bagi orang asing yang masuk dalam wilayah suatu negara .²⁷

Suatu negara bertanggungjawab terhadap warga negara asing dan harta miliknya yang berada di wilayah negaranya. Perjanjian internasional multilateral dan regional atau melalui hukum nasional menetapkan hak dan kewajiban negara terhadap orang asing yang berada dalam wilayah suatu negara, pelanggaran terhadap kewajiban itu menyebabkan negara harus bertanggungjawab terhadap orang asing tersebut. Selain itu, ada juga alasan munculnya pertanggungjawaban negara sebagai akibat tindakan yang dilakukan oleh organ atau pejabatnya berupa melakukan perbuatan *mistreatment* terhadap orang asing dan tindakan atau kelalaian yang merugikan secara ekonomis dan fisik yang dilakukan oleh negara terhadap orang asing.²⁸

Ada 2 pendapat berkenaan dengan perlakuan terhadap orang asing :

²⁷ J. G. Starke, 2003. *op.cit.*, hlm.465

²⁸ Jawahir Tontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama 2006. hlm.206

1. *International Minimum Standard*. Pandangan ini dianut oleh negara-negara maju, menurut pendapat ini maka memperlakukan orang asing di dalam negeri harus memenuhi standar minimum internasional, yaitu sesuai dengan hukum internasional dan perlindungan yang efektif menurut hukum internasional. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka pertanggungjawaban negara timbul. Penerapan prinsip ini tampak dalam perkara *The Neer Claim* tahun 1926. Terhadap perkara ini, pengadilan berpendapat bahwa suatu perlakuan terhadap orang asing dalam suatu kejahatan Internasional apabila perlakuan tersebut merupakan suatu kebiadaban, itikad buruk, kelalaian yang disengaja atau kurangnya tindakan dari pemerintah.
2. *National Treatment Standard*. Pandangan ini dianut oleh negara-negara berkembang, menurut prinsip ini orang asing harus diperlakukan sama seperti halnya negara memperlakukan warga negaranya. Penerapan standar ini dapat ditemukan pada pasal 9 Konvensi Montevideo 1933.

Dengan adanya perbedaan pandangan dari dua kepentingan yang berbeda tersebut, maka sebagai jalan tengah, Garcia Amandor mengemukakan pendapatnya mengenai tanggungjawab negara khususnya berkenaan dengan perlakuan terhadap orang asing, sebagai laporannya pada Komisi Hukum Internasional tahun 1957, sebagai berikut :

1. Orang asing menikmati hak dan jaminan yang sama dengan warga negara tempat ia tinggal, tidak kurang dari jaminan untuk menikmati hak-hak fundamental manusia yang telah ditetapkan dan diakui oleh hukum internasional.
2. Apabila hak-hak tersebut dilanggar, akan melahirkan tanggungjawab negara terhadap pelaku. Dalam hal ini negara asal dapat melakukan perlindungan diplomatik. Untuk itu negara asal perlu memahami prinsip hukum yang berlaku di negara tempat warga negara tinggal.²⁹

Sehubungan dengan pertanggungjawaban negara terhadap orang asing juga dikenal *Denial of Justice*, dalam arti luas berarti kerugian yang timbul bagi orang asing diluar negeri karena pelanggaran keadilan internasional yang dilakukan oleh pejabat eksekutif, yudikatif, legislatif. Dalam arti sempit berarti penyalahgunaan proses peradilan atau pemberian keadilan yang tidak selayaknya, misalnya dalam kasus *Chattin Claim tahun 1972, United States-Mexico General Claims Commission* berpendapat bahwa :

*“Ketidakberesan proses perkara pengadilan terbukti dengan adanya pemeriksaan-pemeriksaan yang tidak semestinya, tidak memberikan kesempatan kepada tergugat untuk mengetahui semua gugatan yang diajukan kepadanya, penundaan perkara yang tidak semestinya, pemeriksaan terbuka di pengadilan hanya formalitas saja”.*³⁰

²⁹ Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Grafindo, Jakarta 2002.hlm.294-295

³⁰ J.G. Starke, 2003.*op.cit.*, hlm. 411

Tiga persoalan yang terkait dengan pertanggungjawaban negara terhadap perlakuan orang asing, yakni *Nationality of Claims*, *Exhaustion of Local Remedies* dan Ekspropriasi.

1. *Nationality of Claims*, negara memberikan perlindungan hukum kepada warganegaraanya di luar negeri apabila timbul perbuatan yang merugikan warganya oleh negara lain. Dalam penentuan nasionalitas warganya yang mengalami kerugian, ditentukan oleh hukum nasional negara yang mengajukan tuntutan.
2. *Exhaustion of Local Remedies*, dimaksudkan untuk meminta pertanggungjawaban negara yang sudah melalui seluruh mekanisme hukum nasional negara setempat. Jadi orang asing yang terlibat dalam suatu perkara di negara lain, terlebih dahulu harus menggunakan mekanisme hukum nasional setempat. Dalam kasus *Ambatioles Arbitration*, Pihak Inggris menolak tuntutan warga negara Turki, yang diwakili negaranya, karena warga Turki tersebut belum menggunakan seluruh upaya hukum yang berlaku di negara Inggris.³¹ Doktrin Calvo, klausul ini sering dimuat dalam kontrak-kontrak antar pemerintah-pemerintah Amerika Tengah dan Selatan dengan pihak-pihak perusahaan asing atau orang-orang yang mempunyai konsesi-konsesi atau hak-hak berdasarkan kontrak tersebut. Tujuan di masukannya klausul ini untuk menjamin bahwa sengketa-sengketa hukum yang timbul dari kontrak tersebut akan

³¹ Jawahir Tontowi dan Pranoto Iskandar, 2006.*op.cit.*, hlm. 209

dilimpahkan pada pengadilan setempat dari negara yang memberikan konsensi dan untuk menghapus yurisdiksi-yurisdiksi pengadilan arbitrase internasional atau mencegah permintaan tindakan diplomatik kepada negara asal perusahaan atau individu yang menikmati konsesi itu.³²

3. Ekspropriasi yang diartikan sebagai pengambilalihan kepemilikan swasta oleh negara. Menurut Resolusi PBB mengenai Kedaulatan Permanen Atas Sumber-Sumber Alam yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB tahun 1962 dinyatakan bahwa :

“Ekspropriasi harus dilakukan berdasarkan kepentingan yang luas dan kompensasi yang adil. Ekspropirasi tidak boleh diskriminatif dan tidak ditujukan kepada kebangsaan tertentu”.

Suatu ekspropriasi tidak berdasarkan hukum apabila dilakukan secara diskriminatif, hanya ditujukan pada kebangsaan tertentu, ketidakmampuan negara untuk kompensasi yang adil dan tidak berdasarkan pada alasan kebijakan publik. Apabila ekspropirasi tidak sesuai dengan hukum, maka ganti kerugian disebut sebagai kerusakan bukan kompensasi . Ganti kerugian ini didasarkan atas standar perhitungan standar normal, bahkan meliputi kerugian yang akan datang, seperti dalam kasus *Amoco Finance Case 1985*.³³

Praktek negara-negara, terdapat beberapa lembaga perlindungan hukum yang dapat dipergunakan oleh orang asing dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum :

³² J.G. Starke, *op.cit.*, hlm. 400-401

³³ Jawahir Tontowi dan Pranoto Iskandar, *op.cit.*, hlm.210

1. Perjanjian antar negara asal dengan negara tempat ia berada untuk mengatur perlindungan warganegaraanya masing-masing dan harta bendanya.
2. Lembaga perlindungan penanaman modal asing, termasuk jaminan dari pemerintah lokal (*host state*) apabila timbul tindakan nasionalisasi, seperti Perjanjian antara Indonesia dengan Belgia tentang Dorongan dan Perlindungan Timbal-Balik Bagi Penanaman Modal pada tanggal 15 Januari 1972.
3. Perjanjian Jaminan Asuransi yang beranggotakan negara penerima modal dan penanam modal pada *Convention Establishing the Multilateral Investment Guarantee Agency* di bawah naungan Bank Dunia.
4. Upaya hukum setempat (*Exhaustion of local remedy*), yang berupa suatu tindakan hukum dari orang asing yang dirugikan melalui tuntutan dihadapan pengadilan setempat.
5. Melalui perlindungan Diplomatik. Upaya ini dilakukan karena adanya pelanggaran terhadap hukum internasional melalui perundingan atau tuntutan di pengadilan atas nama warga negaranya., dengan demikian apabila tindakan perlindungan diplomatik telah diambil, maka yang menjadi pihak berperkara adalah negara, demikian pendapat Mahkamah Internasional Permanent dalam perkara *Mavrommatis Palestine Concession 1924*.

6. Penuntutan melalui forum pengadilan di negara ketiga, apabila objek yang disengketakan berada di wilayah hukum negara forum, contoh perkara tembakau di pengadilan Bremen antara Pemerintah Indonesia dengan pemilik perusahaan tembakau milik warga negara Belanda, karena barang yang disengketakan berada di wilayah Jerman.³⁴

D. Tinjauan terhadap Pelaksanaan Hukuman Mati

1. Hukuman Mati Ditinjau dari Hukum Nasional suatu negara

Kedaulatan hukum adalah sebuah norma dan aturan yang harus dijalankan dan diterapkan atas tindakan kejahatan. Kedaulatan hukum sebuah negara adalah mutlak hak setiap negara yang harus dihormati negara lain. Kemanusiaan pula menjadi titik agar setiap manusia dapat menjadi manusia yang baik dan bukan menghancurkan manusia lainnya. Hubungan Diplomatik juga sebagai elemen penting dalam menjalani hubungan antara negara dalam tatanan internasional.

Hukuman mati menjadi suatu hal dilematis ketika kita dihadapkan pada penerapan kedaulatan hukum dan penerapan nilai-nilai kemanusiaan. Sebagai contoh, di satu sisi negara Cina menerapkan hukuman mati bagi pelaku koruptor di negara mereka. Walaupun hal ini menimbulkan perdebatan dalam ruang internasional, namun isu

³⁴ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *op.cit.*, 2003. hlm. 29

kemanusiaan yang muncul akan dengan sendirinya mencair dikarenakan tidak ada subjek yang dihukum yang merupakan warga negara lain. Dengan kata lain, hukuman mati yang dilakukan oleh pemerintah Cina adalah tindakan yang dilakukan terhadap rakyat Cina sendiri sehingga tidak ada negara manapun yang dapat mengintervensi undang-undang pemerintah Cina.³⁵

Sama halnya dengan negara seperti Arab Saudi, Amerika Serikat, dan negara lainnya yang menjalankan hukuman mati untuk warganya adalah atas dasar upaya penerapan kedaulatan hukum negara tersebut. Pemerintah Cina menganggap kejahatan korupsi merupakan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat sehingga dapat menyengsarakan rakyat dan merugikan negara. Menurut *Amnesty International*, setidaknya 5.837 eksekusi mati dilakukan di 22 negara dan di daerah pada tahun 2010. Diantara beberapa negara yang menerapkannya adalah Cina, Amerika Serikat, Arab Saudi, Korea Utara, Iran, Libya, Indonesia dan lainnya. Bahkan Amerika menerapkan hukuman mati bagi warga negaranya yang terlibat dalam kasus spionase, pembunuhan dan pengkhianatan. Bahkan negara tetangga Malaysia juga memiliki aturan hukum yang mengatur tentang eksekusi mati yang tertuang dalam Bagian 39B Akta Dadah (Narkoba) Berbahaya 1952 yang

³⁵ <http://kabarmedan.com/hukuman-mati-antara-kedaulatan-hukum-dan-hubungan-antar-negara/>. di akses pada pukul 17:15 WITA, Tanggal 12-12-2015.

mewajibkan hukuman mati harus dijalankan kepada pelaku kejahatan narkoba.³⁶

Di negara-negara Timur Tengah, Arab Saudi, dan Iran, tingkat tertinggi hukuman mati dijalankan kepada pelaku pembunuhan , pemerkosaan, perzinahan, pemurtadan, narkoba dan lainnya. Jelas bahwa penerapan hukuman mati di masing-masing negara memiliki perbedaan dalam tingkat vital atau urgensinya berdasarkan hal yang dianggap menjadi ancaman. Namun sangat jelas bahwa penerapan hukuman mati yang dilakukan adalah bentuk kedaulatan formalitas hukum di suatu negara yang berdaulat yang menganggap suatu kasus merupakan ancaman yang bersifat langsung ataupun tidak langsung terhadap kondisi negara ataupun masyarakatnya.

2. Hukuman Mati ditinjau dari segi Instrumen Hukum Internasional

Analisa terhadap beberapa norma hukum Internasional yang sedikit banyak bersentuhan dengan isu pelaksanaan hukuman mati. Terdapat dua jenis instrumen yang secara khusus hendak diamati, yakni Instrumen HAM Internasional dan Instrumen yang berupa Statuta-statuta Mahkamah Kejahatan Internasional. Untuk kategori yang pertama, terdapat dua instrumen yang dibahas, yakni Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, kedua Instrumen ini dipilih untuk dibahas karena

³⁶ *ibid.*,

keduanya seringkali dipergunakan sebagai argumen untuk mengatakan bahwa norma-norma hukum internasional melarang penerapan hukuman mati. Sedangkan untuk kategori yang kedua, instrumen Hukum Internasional yang hendak diamati adalah *agreement for the prosecution and punishment of the major war criminals of the european axis*, *Statuta International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY)*, *Statuta International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)* dan Statuta Roma 1998 yang menjadi dasar pembentukan *International Criminal Court (ICC)*.

a. Hukuman mati ditinjau dari Pasal 3 DUHAM.

Berdasarkan Pasal 3 " *Setiap orang berhak atas kehidupan, kemerdekaan, dan keamanan pribadi* ". Bentuk yang paling ekstrim dari pelanggaran hak untuk hidup ini ialah pembunuhan atau melukai jasmai atau rohani dari seseorang ataupun dari kelompok Hukuman mati jelas telah melanggar pasal ini, dimana orang yang dijatuhi hukuman mati telah dirampas kehidupannya, kemerdekaannya, keamanan pribadinya. Bagaimanapun juga, hukuman mati adalah hukuman yang sangat melanggar hak untuk hidup bagi manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Dapat dilihat banyak orang yang telah dijatuhi hukuman mati, antara lain koruptor di Cina, Saddam Hussein, ataupun lainnya. Namun seperti kasus Rwanda dan Yugoslavia pelaku pelanggaran HAM hanya diganjar dengan hukuman maksimal pidana seumur hidup, karena

hukuman mati di jaman modern ini mulai ditinggalkan oleh negara-negara di dunia, meskipun masih ada beberapa negara yang masih melaksanakannya dengan berbagai cara.³⁷

Pengaturan tentang hak dasar yaitu hak untuk hidup yang diatur dalam DUHAM tersebut yang dalam hal ini dihubungkan dengan hukuman mati, terdapat pengecualian terhadap pelaksanaan hak tersebut yaitu dengan adanya pemahaman mendalam terhadap adanya *derogable rights*, yaitu dalam hal yang pertama "*a public emergency which threatens the life of nation*" dapat dijadikan dasar untuk membatasi pelaksanaan hak-hak kebebasan dasar, dengan syarat bahwa kondisi keadaan darurat (*public emergency*) tersebut harus diumumkan secara resmi (*be officially proclaimed*), bersifat terbatas serta tidak boleh diskriminatif.³⁸

b. Hukuman mati ditinjau dari Pasal 6 ICCPR

Hukuman mati ditinjau menurut Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan politik yaitu *Pasal 6 ayat (1) Pada setiap insan manusia melekat hak untuk hidup. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorangpun insan manusia yang secara gegabah boleh dirampas kehidupannya*. Seperti halnya dijelaskan pada Pasal 3 DUHAM bahwa pelaksanaan eksekusi mati, telah melanggar pasal 6 ayat (1), eksekusi

³⁷ Levin, Leah. 1987. *Tanya Jawab Soal Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Pradnya Paramita. hlm.9

³⁸ Haribertus Jaka Triyana. 2007. *Materi Kuliah Hukum HAM Internasional. Program Studi Pascasarjana Fakultas Hukum UGM*. Yogyakarta. : UGM.

mati pada dasarnya menimbulkan kesakitan fisik dan dirampasnya hak hidup dari seseorang, dan ini yang bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) ICCPR dan Pasal 3 DUHAM. Meskipun banyak negara belum menghapuskan hukuman mati antara lain Indonesia, Cina dan negara Irak belum menghapuskan hukuman mati, yang menjadi permasalahan adalah tidak adanya pemenuhan dan pengaturan yang jelas terhadap pelaksanaan hukuman tersebut baik itu dalam proses penangkapan maupun dalam pelaksanaan pemeriksaan di persidangan, sehingga hal tersebut bertentangan dengan konsep *the rule of law* dimana terdapatnya pengaturan yang jelas baik itu persamaan kedudukan dihadapan hukum dan juga terdapatnya peradilan yang bebas dan tidak memihak yang berimplikasi kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Pasal 6 ayat (2) Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil Politik menyatakan bahwa

Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusannya dapat diberikan hanya untuk kejahatan yang paling berat, sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada waktu kejahatan demikian dilakukan, dan tanpa melanggar suatu ketentuan dari Kovenan ini dan Konvensi Tentang Pencegahan Dan Penghukuman Kejahatan Pemusnahan (suku) Bangsa. Hukuman ini hanya boleh dilaksanakan dengan putusan terakhir dari pengadilan yang berwenang.

Lebih lanjut Pasal 6 ayat (4) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil Politik mengatur bahwa

Seseorang yang telah dihukum mati harus mempunyai hak untuk memohon pengampunan atau keringanan hukuman. Amnesti, pengampunan, atau keringanan hukuman mati dapat diberikan dalam segala bab.

Hal tersebut diatur secara limitatif dalam Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik, dalam Pasal 4 ayat (1) ICCPR menyatakan :

Dalam keadaan darurat umum yang mengancam kehidupan bangsa dan terdapatnya keadaan darurat tersebut telah diumumkan secara resmi, negara-negara pihak pada kovenan ini dapat mengambil upaya-upaya yang menyimpang (derogate) dari kewajiban mereka berdasarkan kovenan ini, sejauh hal itu dituntut oleh situasi darurat tersebut, dengan ketentuan bahwa upaya-upaya tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban negara-negara pihak itu menurut hukum internasional, dan tidak menyangkut diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, dan asal-usul sosial, sehingga vonis mati yang dijatuhkan terhadap seseorang tidak bertentangan dengan Pasal 3 DUHAM, karena kejahatan yang dilakukan adalah kejahatan HAM berat dan memenuhi ketentuan Pasal 4 ICCPR.³⁹

3. Hukuman Mati ditinjau dari segi Statuta-statuta Mahkamah Internasional

Kecenderungan negara-negara untuk menolak pemberlakuan hukuman mati terlihat jelas melalui Statuta-statuta yang mendasari pembentukan beberapa mahkamah yang bersifat Internasional khususnya, *Nurenberg International*, *ICTY (International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia)*, *ICTR (International Criminal Tribunal for Rwanda)*, dan *ICC (International Criminal Court)*.

³⁹ Pan Mohamad Faiz. 2007. *Hukuman Mati dan Hak Untuk Hidup*. <http://jurnalhukum.blangspot.com/2007/05/penelitian-hukum-hukuman-mati-dan-hak.html>. diakses pada pukul 22.45 WITA, Tanggal 5-12-2015.

a. Nurenberg Tribunal

Mahkamah Tribunal adalah peradilan militer yang diselenggarakan oleh negara-negara pemenang Perang Dunia 2 untuk mengadili personil Jerman yang dianggap melakukan kejahatan Internasional selama Perang Dunia 2. Persetujuan yang melandasi pelaksanaan Mahkamah Nurenberg, yakni “*agreement for the prosecution and punishment of the major war criminals of the european axis*” pada tanggal 8 Agustus tahun 1945 secara tegas memuat ancaman pidana mati.

b. ICTY (*International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia*) dan ICTR (*International Criminal Tribunal for Rwanda*)

ICTY (*International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia*) dan ICTR (*International Criminal Tribunal for Rwanda*) adalah dua Mahkamah Kejahatan Internasional ad-hoc yang dibentuk pada tahun 1990 an, sekitar empat dekade setelah pembentukan Mahkamah Nurenberg.

Perubahan mendasar yang terjadi diantara Mahkamah Nurenberg dengan ICTY dan ICTR, Khususnya menyangkut pidana mati. Meskipun tidak secara eksplisit terdapat gagasan yang kuat didalam statuta ICTY dan ICTR untuk menolak penerapan pidana mati. Artikel 24 Statuta ICTY dan Artikel 23 ICTR menegaskan bahwa “*the penalty imposed by the trial chamber shall be limited to Imprisonment*” ini berarti bahwa didalam

sistem peradilan ICTY dan ICTR, pidana mati tidak akan diterapkan. Dapat diartikan bahwa para pelaku Genosida, pelaku kejahatan perang, dan pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk yang terwujud dalam tindakan-tindakan penyiksaan, eksperimen biologis dalam perang, penyanderaan penduduk sipil, pengeboman desa-desa yang bukan merupakan objek militer dalam perang, perbudakan, pembunuhan, penyiksaan dan perkosaan sampai kapanpun tidak akan pernah dipidana mati dibawah sistem ICTY dan ICTR.

c. ICC (*International Criminal Court*)

Dasar penyelenggaraan *International Criminal Court (ICC)* yakni Statuta Roma 1998 yang sebelumnya sudah dimulai oleh ICTY dan ICTR terkait dengan pidana mati. Dalam artikel 77 Statuta Roma secara tegas menyatakan bahwa pidana pokok yang bisa dijatuhkan terhadap pelaku Genosida (*Genocide*), kejahatan terhadap kemanusiaan (*Crime Against Humanity*), Kejahatan Perang (*War Crimes*), dan Kejahatan Agresi (*The Crime of Agression*). Adalah :

- a. *Imprisonment for a specified number of years, which may not exceed a maximum of 30 years : or*
- b. *A term of life imprisonment when justified by the extreme gravity of the crime and the individual circumstances of the convicted person.*

Sedangkan pidana tambahan yang dapat dijatuhkan adalah :

- a. *a fine Under the criteria provided for in the rules of procedure and evidence.*

b. a forfeiture of proceeds. Property and assets derived directly or indirectly from that crimes, without prejudice to the rights of bona fide third parties.

Sistem pemidanaan didalam ICC yang hanya bisa diatasi pada pidana penjara (*imprisonment*) akan membuat pelaku kejahatan Internasional yang diatur dalam artikel 5 Statuta Roma (Genosida, Kejahatan Perang, Kejahatan terhadap kemanusiaan, dan Kejahatan Agresi) tidak akan pernah tersentuh oleh pidana mati, meskipun perbuatan dari pelaku kejahatan ini luar biasa kejam dan tindakannya menyebabkan matinya ribuan orang, termasuk perempuan dan anak-anak.

Pada titik inilah situasi paradoksal bisa muncul. Jika penghapusan pidana mati seperti yang terefleksikan didalam statuta ICTY, ICTR, dan ICC dianggap sebuah perlindungan *the right to life* dari pelaku kejahatan Internasional, maka perlindungan itu justru telah memberikan sebuah hak istimewa (*privilege rights*) kepada orang yang salah, yang justru secara kasar dan eksekutif telah melanggar hak hidup (*the right to life*) sekian ribu orang yang menjadi korban perbuatan si pelaku. Pada titik ini pula rasa keadilan bisa menjadi sangat terusik.

E. Hak-hak seorang terpidana yang dijatuhi sanksi hukuman mati dalam Hukum Internasional.

Dalam Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) berkaitan dengan hukuman mati, PBB telah mengeluarkan sebuah

panduan berjudul Jaminan Perlindungan bagi Mereka yang Menghadapi Hukuman Mati (*Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty*) melalui Resolusi Dewan Ekonomi Sosial PBB 1984/50, tertanggal 25 Mei 1984).⁴⁰ Panduan ini memperjelas pembatasan praktek hukuman mati menurut Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik . Pembatasan praktek hukuman mati tersebut antara lain :

1. Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati dalam sistem hukum positifnya, penerapannya hanya bisa berlaku bagi 'kejahatan yang paling serius', yang kategorinya harus sesuai dengan tingkat konsekwensi yang sangat keji.
2. Hukuman mati hanya boleh berlaku bila kejahatan tersebut tercantum dalam produk hukum tertulis yang tidak bisa bersifat *retroaktif* (berlaku surut) pada saat kejahatan tersebut dilakukan. Dan jika di dalam produk hukum tersebut tersedia hukuman yang lebih ringan, maka yang terakhir ini yang harus diterapkan.
3. Hukuman mati tidak boleh diterapkan pada anak yang berusia 18 tahun pada saat ia melakukan kejahatan tersebut. Hukuman mati tidak boleh diterapkan kepada perempuan yang sedang hamil atau ibu yang baru melahirkan. Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan kepada orang yang cacat mental atau gila.

⁴⁰ Mutfi Makarim, *Beberapa Pandangan Tentang Hukuman Mati (Death Penalty) Dan Relevansinya Dengan Perdebatan Hukum Di Indonesia*, Pusat Dokumentasi ELSAM.hlm.4

4. Hukuman mati hanya boleh diterapkan ketika kesalahan si pelaku sudah tidak menyediakan sedikitpun celah yang meragukan dari suatu fakta atau kejadian.
5. Hukuman mati hanya bisa dijatuhkan sesuai dengan keputusan hukum yang final lewat sebuah persidangan yang kompeten yang menjamin seluruh prinsip *fair trial*, paling tidak sesuai dengan Pasal 14 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, termasuk pada setiap kasus yang diancam hukuman mati, seorang terdakwa harus disediakan pembelaan hukum yang memadai.
6. Seseorang yang dijatuhi hukuman mati berhak untuk mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi dan banding tersebut bersifat imperatif/wajib.
7. Seseorang yang dijatuhi hukuman mati berhak untuk mengajukan pengampunan, atau perubahan hukuman. Hal ini harus mencakup semua jenis kejahatan.
8. Hukuman mati tidak boleh diberlakukan untuk membatalkan upaya pengajuan pengampunan atau perubahan hukuman.
9. Ketika eksekusi mati dijalankan, metodenya harus seminimal mungkin menimbulkan penderitaan.

Hukuman mati merupakan salah satu isu yang paling kontroversial dalam Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia (*International Covenant on Civil and Political Rights*). Meski diakui hak hidup sebagai *non-derogable rights* (hak

yang tidak dapat dikurang-kurangi), pada Pasal 6 (ayat 2, 4, dan 5) secara tekstual dinyatakan bahwa hukuman mati masih diperbolehkan.⁴¹

⁴¹ Mutfi Makarim. *Ibid.*, hlm.6

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memilih 2 (dua) tempat penelitian, yaitu:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin,
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

dan selain itu penulis juga mencari data melalui situs-situs yang penulis anggap relevan di internet.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis bahan yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu:

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, pernyataan PBB yang diperoleh langsung melalui internet, berita media masa baik cetak maupun elektronik dan situs-situs internet yang dianggap relevan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan Bahan dalam Penelitian ini dilakukan melalui teknik Kepustakaan (*literature research*), yang ditujukan untuk memperoleh bahan-bahan dan informasi-informasi sekunder yang diperlukan dan relevan dengan penelitian, yang bersumber dari buku-buku, media massa, jurnal serta sumber-sumber informasi lainnya seperti data-data yang terdokumentasi melalui situs-situs internet yang relevan.

D. Analisa Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan bahan-bahan yang diperoleh dari tinjauan kepustakaan yang bersumber dari buku-buku dan literatur lain. Data yang diperoleh penulis akan dianalisa secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif, yaitu menganalisis data yang diperoleh berdasarkan aturan hukumnya serta untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hukuman mati di Indonesia telah menjadi bagian dari sistem hukum Indonesia sejak sebelum kemerdekaan pada tahun 1945, dan diterapkan atas serangkaian jenis kasus kejahatan seperti dalam kasus pembunuhan dengan sengaja dan berencana, kejahatan terkait narkoba (memproduksi, memproses, mengekstraksi, mengubah, atau menyediakan narkotika), dan tindak kejahatan terorisme. Berdasarkan Hukum Internasional, hukuman mati hanya dapat diterapkan pada kejahatan yang paling serius yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM berat, seperti halnya Genosida (*Genocide*), Kejahatan terhadap Kemanusiaan (*Crimes Against Humanity*), Kejahatan Perang (*Crimes of War*) dan Agresi (*Agression*).

Didalam sistem hukum positif Indonesia ancaman penjatuhan sanksi Hukuman Mati dimuat dalam serangkaian tindak kejahatan yang termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) seperti Tindak Pidana Korupsi yang menyebabkan kerugian materiil secara besar-besaran kepada negara, Tindak pidana Narkotika, Tindak Pidana Terorisme, dan pelanggaran HAM Berat (Pembunuhan dengan sengaja dan berencana).

A. Tanggungjawab negara (*State Responsibility*) terhadap Pelaksanaan Hukuman mati bagi Warga Negara Asing di Indonesia.

Pada pelaksanaan eksekusi mati yang dilakukan pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil

Presiden Muhammad Jusuf Kalla pada tanggal 18 Januari 2015 terhadap enam orang terpidana mati yang terkait dengan kejahatan narkoba yakni Rani Adriani alias Melisa Aprilia (Warga Negara Indonesia), Daniel Enemuo (Warga Negara Nigeria), Ang Kiem Soe (Belanda), Tran Thi Bich Hanh (Warga Negara Vietnam), Namaona Denis (Warga Negara Nigeria) dan Marco Archer Cardoso Moreira (Warga Negara Brazil).⁴²

Pelaksanaan terhadap eksekusi mati tersebut menuai protes keras dari berbagai pihak seperti Organisasi Hak Asasi Manusia (HAM) baik lokal maupun Internasional. Terlepas dari protes keras yang dilakukan oleh berbagai pihak, setelah tiga bulan kemudian, pada tanggal 29 April 2015, delapan orang yang dijatuhi hukuman mati terkait dengan kasus narkoba kembali dieksekusi, mereka adalah Andrew Chan dan Myuran Sukumaran (Warga Negara Australia), Raheem Agbaje Salami alias Jamiu Owolabi Abashin (Warga Negara Nigeria), Zainal Abidin (Warga Negara Indonesia), Martin Anderson alias Belo (Warga Negara Ghana), Rodrigo Gularte (Warga Negara Brazil), Sylvester Obiekwe Nwolise (Warga Negara Nigeria) dan Okwudili Oyatanze (Warga Negara Nigeria), selain itu untuk dua orang lainnya diberikan penangguhan sementara atas eksekusinya.

⁴² Amnesty International, *Indonesia : First executions under new president retrograde step for rights*, [Indonesia : Eksekusi mati pertama dibawah Presiden baru langkah mundur bagi HAM] <http://www.amnesty.org/en/press-releases/2015/01/indonesia-first-executions-under-new-president/>. di akses pada pukul 17:15 WITA, Tanggal 25-1-2016.

Dalam pelaksanaan Eksekusi mati tersebut penulis berpendapat bahwa hal itu merupakan sebuah putar balik kebijakan pemerintahan Indonesia setelah sekian tahun mengindikasikan negara bergerak menjauhi hukuman mati. Sehingga Pelaksanaan eksekusi mati tersebut memberikan dampak yang kurang baik dalam menjamin penegakkan Hak Asasi Manusia di Indonesia. dilihat dari beberapa kasus yang telah ada sebelumnya yang memiliki ancaman sanksi Hukuman mati baik itu yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme, narkoba, dan pembunuhan dengan sengaja dan berencana, maka kasus yang paling dominan yakni kasus yang berkaitan dengan tindak pidana Narkoba.

Tabel 1. (daftar nama-nama terpidana mati yang telah dieksekusi oleh pemerintah Republik Indonesia dari tahun 2003-2015)

Tahun	Nama	Tindak Pidana
2015	Raheem Agbaje Salami alias Jamiu Owolabi Abashin (Nigeria)	Narkoba
	Andrew Chan (Australia)	Narkoba
	Myuran Sukumaran (Australia)	Narkoba
	Rodrigo Gularte (Brazil)	Narkoba
	Zainal Abidin (Indonesia)	Narkoba
	Martin Anderson alias Belo (Nigeria/Ghana)	Narkoba
	Sylvester Obiekwe Nwolise (Nigeria)	Narkoba

	Okwudili Oyatanze (Nigeria)	Narkoba
	Marco Archer Cardoso Moreira (Brazil)	Narkoba
	Ang Kiem Soe (Belanda)	Narkoba
	Namaona Denis alias Salomon Chibuke Okafer (Nigeria)	Narkoba
	Rani Adriani alias Melisa Aprilia (Indonesia)	Narkoba
	Daniel Enemuoh alias Diarrssaouba (Nigeria)	Narkoba
	Tran Thi Bich Hanh (Vietnam)	Narkoba
2013	Mohammad Abdul Hafeez (Pakistan)	Narkoba
	Ibrahim bin Ujang (Indonesia)	Pembunuhan
	Jurit bin Abdullah (Indonesia)	Pembunuhan
	Suryadi Swabuana (Indonesia)	Pembunuhan
	Adami Wilson (Nigeria/Malawi)	Narkoba
2008	Amrozi Nur Hasyim (Indonesia)	Terorisme
	Ali Gufron alias Mukhlas (Indonesia)	Terorisme
	Imam Samudera (Indonesia)	Terorisme
	Rio Alex Bullo (Indonesia)	Terorisme
	Usep alias TB Yusuf Maulana (Indonesia)	Pembunuhan
	Sumiarsih (Indonesia)	Pembunuhan
	Sugeng (Indonesia)	Pembunuhan

	Ahmad Suraji alias Dukun AS (Indonesia)	Pembunuhan
	Samuel Iwuchukuwu Okoye (Nigeria)	Narkoba
	Hanshen Anthony Nwaliosa (Nigeria)	Narkoba
2007	Ayub Bulubili (Indonesia)	Pembunuhan
2006	Fabianus Tibo (Indonesia)	Pembunuhan
	Marinus Riwu (Indonesia)	Pembunuhan
	Dominggus Da Silva	Pembunuhan
2005	Astini (Indonesia)	Pembunuhan
	Turmudi (Indonesia)	Pembunuhan
2004	Ayodya Prasad Chaubey (India)	Narkoba
	Saelow Prasad (India)	Narkoba
	Namsong Sirilak (Thailand)	Narkoba
2003	Gerson Pande (Indonesia)	Pembunuhan
	Fredrik Soru (Indonesia)	Pembunuhan

Sumber : Amnesty International (Oktober 2015)

Empat Belas Terpidana mati yang telah dieksekusi pada awal masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, menggambarkan bahwasannya Indonesia melakukan langkah mundur dalam perjalanan menuju penghapusan hukuman mati. Penundaan eksekusi yang dilakukan bertahun-tahun sebelumnya pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memperlihatkan Indonesia di dunia Internasional bahwa pemerintah secara proaktif mengambil langkah-langkah untuk mencegah eksekusi Warga

Negara Indonesia (WNI) diluar negeri, Intervensi yang menghasilkan 240 Keringanan hukuman antara tahun 2011 dan 2014, dan pada tahun 2012 Indonesia mengubah posisinya dari menentang menjadi abstain selama pemungutan suara pada moratorium penggunaan hukuman mati dalam resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Hukuman mati memiliki turunan pelanggaran HAM serius lainnya, yaitu pelanggaran dalam bentuk tindak peniksaan (psikologis), kejam dan tidak manusiawi. Hal ini bisa terjadi karena umumnya rentang antara vonis hukuman mati dengan eksekusinya berlangsung cukup lama. Tragisnya Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi Anti Peniksaan dan mengadopsinya menjadi UU Anti Peniksaan No.5/1998.

Penerapan hukuman mati di Indonesia juga bertentangan dengan perkembangan peradaban bangsa-bangsa di dunia saat ini. *Amnesty Internasional* dalam laporannya mencatat hingga September 2007 ini, terdapat 142 negara dengan rata-rata pertambahan 3 negara tiap tahun yang telah menghapuskan hukuman mati, baik melalui mekanisme hukum maupun praktek konkrit. Bahkan dari jumlah di atas, 24 negara memasukkan penghapusan hukuman mati di dalam konstitusinya. Wilayah yang negaranya paling aktif menghapus praktek hukuman mati adalah Afrika, yang memiliki kultur, sistem politik, dan struktur sosial yang mirip dengan Indonesia. Penghapusan hukuman mati baik melalui mekanisme hukum atau politik di Indonesia dapat meninggikan martabat Indonesia di mata komunitas internasional.

Didalam konteks politik hukum Indonesia, hukuman mati harus ditolak karena :

1. Karakter reformasi hukum positif Indonesia masih belum menunjukkan sistem peradilan yang independen, imparsial, dan aparatusnya yang bersih. Bobroknya sistem peradilan bisa memperbesar peluang hukuman mati lahir dari sebuah proses yang salah. Kasus hukuman mati Sengkon dan Karta pada tahun 1980 di Indonesia bisa menjadi pelajaran pahit buat kita. Hukum sebagai sebuah institusi buatan manusia tentu tidak bisa selalu benar dan selalu bisa salah.
2. Dari kenyataan sosiologis, tidak ada pembuktian ilmiah hukuman mati akan mengurangi tindak pidana tertentu.⁴³ Artinya hukuman mati telah gagal menjadi faktor determinan untuk menimbulkan efek jera, dibandingkan dengan jenis hukuman lainnya. Kajian PBB tentang hubungan hukuman mati (*capital punishment*) dan angka pembunuhan antara 1988-2002 berujung pada kesimpulan hukuman mati tidak membawa pengaruh apapun terhadap tindak pidana pembunuhan dari hukuman lainnya seperti hukuman seumur hidup. Meningkatnya kejahatan narkoba, terorisme, atau kriminal lainnya tidak semata-mata disebabkan oleh ketiadaan hukuman mati, namun oleh problem struktural lainnya seperti kemiskinan atau aparat hukum/negara yang korup. Pada tahun

⁴³ Carsten Anckar, *Determinants of the Death Penalty; Comparative Study of the World*, Routledge, London and New York, 2004.

2005 misalnya ditemukan pabrik pil ekstasi berskala internasional di Cikande, Serang, Banten. Pabrik ini dianggap sebagai pabrik ekstasi terbesar ketiga di dunia dengan total produksi 100 kilogram ekstasi per minggu dengan nilai sekitar Rp 100 milyar.⁴⁴ Ternyata operasi ini melibatkan dua perwira aparat kepolisian; Komisaris MP Damanik dan Ajun Komisaris Girsang.⁴⁵ Meningkatnya angka kejahatan narkoba juga diakui oleh Polda Metrojaya. angka kasus narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya (narkoba) tahun 2004 naik hingga 39,36 persen jika dibandingkan dengan angka kasus narkoba tahun 2003. Selama tahun 2004 Polda Metrojaya telah menangani 4.799 kasus narkoba, atau meningkat 1.338 kasus jika dibandingkan kasus narkoba tahun 2003 yang hanya 3.441 kasus.⁴⁶

Pada kejahatan terorisme hukuman mati umumnya justru menjadi faktor yang menguatkan berulangnya tindakan di masa depan. Hukuman mati justru menjadi amunisi ideologis untuk meningkatkan radikalisme dan militansi para pelaku. sampai saat ini bahkan kejahatan terorisme masih menjadi momok bagi suatu negara dan negara sama sekali tidak punya jawaban efektif atas persoalan ini. Terakhir kali pada tanggal 14 Januari 2016 terjadi lagi kasus bom bunuh diri di jalan MH. Thamrin Jakarta Pusat. Selain itu Satu pernyataan pelaku kasus pemboman di depan Kedubes

⁴⁴ Narkoba Made in Cikande, Gatra, 26 November 2005.

⁴⁵ Kasus Suap: Dua Perwira Polisi Ditahan, Kompas, 19 November 2005. diakses pukul 18:10 Wita, Tanggal 25-1-2016.

⁴⁶ Ada Apa di Balik Meningkatnya Kasus Penyalahgunaan Narkoba?, Kompas, 15 Februari 2005. diakses pukul 20:45 Wita, Tanggal 25-1-2016.

Australia, Jakarta pada tanggal 9 September 2004, Iwan Dharmawan alias Rois, ketika divonis hukuman mati oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 November 2005, menyatakan :

*“Saya tidak kaget dengan vonis ini karena saya sudah menyangka sejak awal saya menjadi terdakwa. Saya menolak vonis ini karena dijatuhkan oleh pengadilan setan yang berdasarkan hukum setan, bukan hukum Allah. Kalaupun saya dihukum mati, berarti saya mati syahid”.*⁴⁷

Sikap ini juga ditunjukkan terdakwa kasus bom lainnya yang umumnya menolak meminta grasi atau pengampunan atas perbuatan yang telah dilakukan.⁴⁸ Penerapan hukuman mati jelas tidak berefek positif untuk kejahatan terorisme semacam ini.

3. Praktek hukuman mati di Indonesia selama ini masih bias kelas dan diskriminasi, dimana hukuman mati tidak pernah menjangkau pelaku dari kelompok elit yang tindak kejahatannya umumnya bisa dikategorikan sebagai kejahatan serius/luar biasa. Para pelaku korupsi, pelaku pelanggaran berat HAM dengan jumlah korban jauh lebih banyak masih dan merugikan ekonomi orang banyak tidak pernah divonis mati. Padahal janji Presiden SBY pada waktu itu

⁴⁷ Divonis Mati, Rois Bersyukur, Suara Pembaruan, 14 September 2005. diakses pukul 21:00 Wita, Tanggal 26-1-2016.

⁴⁸ Imam Samudra: Saya tak akan Minta Grasi, Republika, 18 Agustus 2005. Keluarga Pengebom Bali Menolak Ajukan Grasi, Koran Tempo, 15 Oktober 2005. Keluarga Pilih Imam Samudra Dieksekusi, Indopost, 16 Oktober 2005. Amrozi Dkk Tetap Tolak Ajukan Grasi, Media Indonesia, 20 Oktober 2005. Ditawari Grasi, Amrozi Mencemooh, Indopost, 20 Oktober 2005. Perkara Bom Bali; Imam Samudra, Amrozi, Ali Ghufron Tolak Ajukan Grasi, Kompas, 20 Oktober 2005. Keluarga Amrozi Tak Akan Ajukan Grasi, 22 Oktober. 2005. Amrozi Cs Tolak Tanda Tangan Grasi, 22 Oktober 2005. diakses pukul 21:20 Wita, Tanggal 26-1-2016.

hukuman mati diprioritaskan buat kejahatan luar biasa seperti narkoba, korupsi, dan pelanggaran berat HAM.

4. Penerapan hukuman mati juga menunjukkan wajah politik hukum Indonesia yang kontradiktif. Salah satu argumen pendukung hukuman mati adalah karena sesuai dengan hukum positif Indonesia. Padahal semenjak era reformasi/transisi politik berjalan telah terjadi berbagai perubahan hukum dan kebijakan negara. Meski hukuman mati masih melekat pada beberapa produk hukum nasional, namun reformasi hukum juga menegaskan pentingnya hak untuk hidup. Pasal 28I ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945 (Amandemen Kedua) menyatakan :

“hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan umum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Dilihat dari beberapa peraturan dan perundang-undangan yang ada, Tercatat masih terdapat 11 perundang-undangan yang memasukkan sanksi penjatuhan hukuman mati, sehingga hal ini bertentangan dengan semangat Konstitusi yang telah ada sebelumnya.

5. Sikap politik pemerintah terhadap hukuman mati bersifat ambigu. Beberapa waktu lalu pemerintah mengajukan permohonan secara gigih kepada pemerintah Arab Saudi, Malaysia, dan Singapura untuk tidak menjalankan hukuman mati kepada warga negara Indonesia, dengan alasan kemanusiaan. Namun hal ini tidak terjadi

pada kasus hukuman mati untuk Warga Negara Asing yang telah usai menjalani masa penantiannya setelah dieksekusi mati pada awal masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla.

Pada tanggal 18 Desember tahun 2007 , Majelis Umum PBB melakukan *voting* untuk melakukan moratorium dalam menyerukan resolusi bagi setiap negara anggota yang masih menerapkan sanksi hukuman mati dalam hukum positif yang sedang dianutnya dan hasilnya terdapat 104 negara setuju, 54 menolak, dan 29 abstain dalam menyetujui sebuah resolusi untuk menyerukan semua negara anggotanya (yang masih mempraktekan hukuman mati) untuk melakukan moratorium. Meskipun resolusi ini bukan merupakan keputusan yang mengikat secara hukum bagi anggota-anggota PBB, jelas secara politik perkembangan ini memberikan energi politik baru bagi negara-negara atau organisasi-organisasi non-negara yang mempromosikan abolisi hukuman mati.

Resolusi 629/14 yang merupakan hasil advokasi kekuatan pro-abolisi hukuman mati menjadi senjata politik diplomatis untuk mempengaruhi (dan menekan) negara-negara retensionis (yang masih menerapkan hukuman mati). Organisasi supra negara yang aktif dalam advokasi anti hukuman mati seperti *Council of Europe/CoE* (Dewan Eropa),⁴⁹ *European Union/EU* (Uni Eropa),⁵⁰ dan *Organization for Security*

⁴⁹ *Council of Europe/CoE* terdiri dari 47 negara anggota, mencakup pula negara-negara di luar kawasan Eropa seperti Georgia, Ajerbaizan, dan Armenia yang terletak di Asia. Abolisi hukuman mati merupakan syarat wajib untuk keanggotaan dalam organisasi ini. Di bawah CoE inilah berlaku mekanisme regional pengadilan HAM (*the European Court of Human Rights*).

and Co-operation in Europe/OSCE,⁵¹ akan semakin agresif melancarkan kampanye abolisi hukuman mati dalam kebijakan eksternalnya. Resolusi Majelis Umum PBB tentang moratorium hukuman mati juga menjadi sebuah momentum reflektif bagaimana saat ini praktek hukuman mati secara mayoritas di tingkatan global sudah dianggap menjadi sebuah kebijakan yang usang.

Dengan berbagai pilihan kebijakan, mayoritas negara di dunia sudah menerapkan kebijakan abolisi secara *de jure*⁵² atau *de facto*⁵³ dan eksekusi terhadap terpidana mati hanya dijalankan disedikit negara. Kecenderungan ini dianggap merupakan sebuah perkembangan yang mengejutkan dan merupakan salah satu tematik HAM yang paling progresif pasca Perang Dunia II, bahkan bila dilihat dari evolusinya di tataran hukum internasional.⁵⁴

⁵⁰ *European Union/EU* terdiri dari 27 negara anggota. EU juga menerapkan standard abolisi hukuman mati bagi syarat keanggotaannya (berdasarkan *the Copenhagen Criteria*).

⁵¹ OSCE terdiri dari 56 negara anggota yang semuanya, kecuali Belarusia dan Amerika Serikat sudah menjadi negara abolisi hukuman mati. OSCE memiliki komitmen politik untuk penghapusan hukuman mati, seperti yang dinyatakan di beberapa rapat pentingnya. Lihat OSCE and ODIHR, *The Death Penalty in the OSCE Area; Background Paper 2006*, OSCE/ODIHR, Warsaw, 2006.

⁵² *De jure* abolisi artinya hukuman mati sudah dihapus dari sistem pidana atau sistem hukum/perundang-undangan suatu negara. Beberapa negara secara eksplisit menyatakan abolisi hukuman mati di dalam konstitusinya, beberapa negara tidak eksplisit menyatakannya, atau pernyataan abolisi hukuman mati bisa keluar dari keputusan hukum lainnya, seperti putusan Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung suatu negara.

⁵³ *De facto* abolisi hukuman mati terdiri dari dua tipe: *Pertama*, negara yang meskipun masih menerapkan hukuman mati dalam sistem hukum domestiknya, secara politik menyatakan tidak akan melakukan eksekusi mati. Kategori kedua adalah suatu negara yang masih mempraktekan hukuman mati, namun dalam kurun sepuluh tahun terakhir tidak melakukan eksekusi mati.

⁵⁴ William A. Schabas, *The Abolition of the Death Penalty in International Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2002. Roger Hood, *The Death Penalty; A Worldwide Perspective*, Oxford University Press, Oxford, 2002.

Tabel 2. (praktek negara-negara abolisi dan ritensionis terhadap pelaksanaan hukuman mati di dunia)

No.	KATEGORI	JUMLAH
1.	Negara yang menghapus hukuman mati untuk seluruh kategori kejahatan	91
2.	Negara yang menghapus hukuman mati untuk kategori kejahatan pidana biasa	10
3.	Negara yang melakukan <i>moratorium</i> (<i>de facto</i> tidak menerapkan) praktek hukuman mati	33
4.	Total negara yang melakukan abolisi (penghapusan) terhadap hukuman mati	134
5.	Negara yang masih menerapkan praktek hukuman mati (<i>ritensionis</i> ⁵⁵).	63

Sumber : Amnesty International (Desember 2007).

Melihat tabel di atas, penulis menyimpulkan isu hukuman mati tidak sekedar terpolarisasi pada dua kutub pilihan, abolisionis dan ritensionis. Dari kategori tabel di atas terlihat bahwa masih ada berbagai varian di antara dua kutub posisi tersebut. Resolusi Majelis Umum PBB tentang moratorium hukuman mati jelas merupakan langkah strategis awal untuk menyeret negara-negara ritensionis untuk paling tidak menjadi negara *de facto* abolisi dan mendorong negara-negara dalam kategori *de facto*

⁵⁵ Ritensionis adalah negara yang masih melakukan eskekusi mati dalam kurun 10 tahun terakhir.

abolisi menjadi *de jure* abolisi. Resolusi moratorium ini juga diharapkan mengalihkan negara-negara yang masih menerapkan hukuman mati dalam situasi darurat (perang) untuk menjadi abolisionis secara total.

Praktek eksekusi mati yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada awal masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla menegaskan bahwa Indonesia masih bersikap teguh untuk mempertahankan kebijakan hukuman mati. Sementara itu daftar terpidana mati yang terancam dieksekusi masih cukup panjang.⁵⁶

Diberbagai aturan perundang-undangan cakupan penggunaan hukuman mati di Indonesia bisa dibilang sangat luas dan tidak sesuai dengan kecenderungan norma internasional yang berlaku saat ini. Hukuman mati masih diterapkan untuk kejahatan-kejahatan yang tidak melibatkan kekerasan fisik yang brutal seperti kejahatan ekonomi (korupsi), narkoba, kejahatan politik, dan sebagainya. Langkah mundur lainnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi dalam *judicial review* UU Anti Narkoba yang menyatakan bahwa hukuman mati bersifat konstitusional meskipun Pasal 28I ayat (1) Undang-undang Dasar tahun 1945 (Amandemen Kedua) menyatakan bahwa hak hidup tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*).

⁵⁶ Tidak ada kepastian waktu kapan seseorang akan dieksekusi mati setelah ia mendapat vonis dengan kekuatan hukum yang final. Salah satu dari terpidana mati, Bahar bin Matar, misalnya sudah menunggu eksekusi 34 tahun sejak grasinya ditolak (1972). Untuk data rinci soal mereka yang sudah dieksekusi dan mereka terpidana mati lihat laporan Kontras, Praktek Hukuman Mati di Indonesia, Oktober 2007. www.kontras.org/hmati/data/Working%20Paper_Hukuman_Mati_di_Indonesia.pdf. diakses pada pukul 05:00 Wita, Tanggal 27-1-2016.

Indonesia merupakan negara yang telah mengaksesi Kovenan Sipil dan Politik pada tanggal 23 Februari 2006, namun hingga kini belum juga mengajukan laporan awal kepada Komite HAM. Dalam pembahasan soal laporan tersebut, tidak tertutup kemungkinan Komite HAM akan mempersoalkan praktek hukuman mati di Indonesia mengingat baru dikeluarkannya resolusi Majelis Umum PBB soal moratorium. Sebelumnya ada pihak luar, Uni Eropa yang mencoba melakukan komunikasi dengan Pemerintah RI untuk paling tidak melakukan moratorium dalam waktu tertentu. Namun, Pemerintah RI yang diwakili oleh Wapres Jusuf Kalla dengan tegas menolak usul Uni Eropa agar Indonesia menghapuskan pidana mati pada rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP yang baru. Usul Uni Eropa tersebut disampaikan oleh Dubes Finlandia, Markku Nilnloja, Dubes Jerman, Joachim Broudre Groger, serta delegasi Komisi Uni Eropa, Ulrich Eckle.⁵⁷

Dengan adanya penegassan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla pada waktu itu maka Praktek hukuman mati nampaknya masih akan diterapkan dalam sistem hukum Indonesia ke depan dengan dimasukannya ketentuan ini ke dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁵⁸ Hukuman mati ditempatkan di beberapa ketentuan dalam RUU ini.

- Asas Nasional Aktif [Pasal 7 (ayat 4)] ::

⁵⁷ Hukuman Mati Tidak Akan Dicabut; Dubes Uni Eropa Temui Wapres Jusuf Kalla, Media Indonesia, 5 Juli 2006. diakses pada pukul 05:20 Wita, Tanggal 27-1-2016.

⁵⁸ RUU KUHP ini sudah direvisi selama 25 tahun dan belum ada tanda-tanda akan segera disahkan oleh DPR periode 2004-2009 saat ini.

“Warga negara Indonesia yang di luar wilayah Negara Republik Indonesia melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)⁵⁹, tidak dapat dijatuhi pidana mati jika tindak pidana tersebut menurut hukum negara tempat tindak pidana tersebut dilakukan tidak diancam dengan pidana mati.”

Ketentuan ini sejalan dengan prinsip *non-refoulement* yang berlaku bagi suatu negara yang sudah menerapkan penghapusan praktek hukuman mati. Prinsip *non-refoulement* ini adalah prinsip keharusan suatu negara untuk menolak permintaan ekstradisi dari negara lain bila orang tersebut bisa mendapat ancaman hukuman mati di negeri peminta.

- Pasal 69 (Pidana Penjara) :

“(3) Jika dapat dipilih antara pidana mati dan pidana penjara seumur hidup atau jika ada pemberatan pidana atas tindak pidana yang dijatuhi pidana penjara 15 (lima belas) tahun, maka pidana penjara untuk waktu tertentu dapat dijatuhkan untuk waktu 20 (dua puluh) tahun berturut-turut.”

- Paragraf 11 (Pidana Mati) :

- Pasal 87 :

“Pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat”.

- Pasal 89

(1) Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, jika:

- a. Reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar;*
- b. Terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki;*

⁵⁹ Pasal 7 (ayat 1) dalam RUU KUHP ini menyatakan: Ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara Republik Indonesia.

c. Kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting; dan

d. Jika ada alasan yang meringankan.

(2) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama (dua puluh) tahun dengan Keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum.

(3) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

- Pasal 90 :

“Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana melarikan diri, maka pidana tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden”.

Ada beberapa kemajuan dalam RUU ini. Seperti adanya pertimbangan akhir lewat evaluasi yang cukup lama untuk mempersulit eksekusi mati bagi seorang terpidana. Namun menjadi pertanyaan apakah periode penundaan eksekusi yang berkepanjangan terhadap seorang terpidana mati sesuai dengan norma HAM kontemporer. Preseden dan pengalaman Komite HAM (ICCPR) atau Komite Anti Penyiksaan (CAT) yang keduanya sudah diratifikasi Pemerintah Republik Indonesia menunjukan praktek tersebut juga tidak diperkenankan.

Dampak hubungan dengan dunia internasional.⁶⁰

⁶⁰ <http://makassar.lan.go.id/index.php/survei/refleksi/600-dampak-eksekusi-mati-bandar-narkoba-dalam-hubungan-diplomatik-dan-penegakan-hukum>. Diakses pukul 08:45 Wita, Tanggal 28-1-2016.

Pasca pelaksanaan hukuman mati 5 warga Negara asing yang terlibat kasus narkoba maka tentunya akan memberikan dampak dalam hubungan diplomatik khususnya dampak diplomatis dengan Negara terpidana mati tersebut dan bisa saja mereka juga akan memberlakukan hukuman mati bagi warga Negara Indonesia yang melakukan perbuatan kriminal dinegara tersebut termasuk juga menolak upaya diplomatis permintaan pemerintah Indonesia jika ada warga negaranya yang terancam untuk dihukum mati diluar negeri seperti Negara Brazil.

Bahkan seperti kita ketahui warga Negara Indonesia yang ada diluar negeri banyak yang terancam hukuman mati dan mayoritas mereka terancam hukuman mati ada dinegara timur tengah seperti Arab Saudi, berkaca pada pemerintahan sebelumnya di era pemerintahan SBY sukses menempuh upaya diplomatis dengan Negara arab Saudi yang menyebabkan beberapa warga Negara Indonesia yang terancam hukuman mati akhirnya dimaafkan pemerintahan arab Saudi termasuk keluarga korban, asalkan dengan persyaratan mampu membayar denda sebagai ganti rugi yang jumlahnya milyaran rupiah.

Ketegasan menghukum mati para pelaku Narkoba tentunya memberikan konsekwensi tersendiri termasuk hubungan dengan Negara lain dalam hak *mutual legal assitence* bagi warga Negara Indonesia yang terancam hukuman mati diluar negeri dan bisa saja warga Negara Indonesia yang terancam hukuman mati diluar negeri tidak akan

mendapatkan pengampunan juga dari Negara tersebut sama halnya Negara Indonesia yang tidak memberikan pengampunan bagi warga Negara asing meskipun upaya diplomatis telah dilakukan seperti yang dilakukan presiden Brazil yang langsung menghubungi presiden Jokowi namun permintaannya untuk membebaskan warganya ditolak Presiden Jokowi. Bahkan kini Pemerintah Brazil dan Belanda menarik Duta besar mereka dari Indonesia sebagai upaya protes keras terhadap keputusan pemerintah Indonesia yang mengeksekusi warga negaranya.

B. Standar perlakuan hukum Internasional dalam Pemenuhan Hak- hak terpidana mati bagi Warga Negara Asing di Indonesia.

Pengaturan hak-hak seorang terpidana yang dijatuhi hukuman mati di Indonesia.

1. Hak akses pada Pengacara Pilihan Sendiri

Semua orang yang ditangkap atau ditahan atas tuduhan pidana memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum yang kompeten dan efektif dari awal penyelidikan kriminal dan segera setelah mereka dirampas kebebasannya. Hal ini memungkinkan individu untuk melindungi hak-hak mereka dan untuk mempersiapkan pembelaan mereka dan berfungsi sebagai jaminan keamanan yang penting dari penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya dan dari dipaksa mengaku atau pernyataan diri yang memberatkan lainnya. Hak ini meliputi

semua tingkat pemeriksaan pidana, termasuk pemeriksaan pendahuluan, sebelum dan selama persidangan dan banding.⁶¹ Jika terdakwa tidak mampu membayar jasa dari seorang pengacara, maka pengacara harus disediakan secara gratis.⁶² Terdakwa harus memiliki waktu dan fasilitas yang cukup, termasuk penerjemah bahasa bagi terpidana warga negara asing untuk menyiapkan pembelaanya. Pihak berwenang memiliki kewajiban khusus dalam kasus hukuman mati untuk memastikan bahwa penasihat hukum yang ditunjuk kompeten dan efektif.

Ketentuan Perundang-undangan Indonesia yang menjamin hak untuk mendapatkan penasihat hukum yang kompeten dimuat dalam :

- Pasal 54 dan pasal 55 KUHAP.
- Pasal 17 ayat 1 (b) undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan hak anak.
- Pasal 56 ayat 1 dan ayat 2, dan pasal 57 ayat 2 undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁶¹ Prinsip ke satu dari Prinsip- Prinsip Dasar PBB tentang peran pengacara, diadopsi di kongres PBB kedelapan tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap pelaku kejahatan, di Havana, Kuba, 27 Agustus hingga 7 September 1990.

⁶² Pasal 14(3)(d) ICCPR.

- Pasal 68 b ayat 1 dan 2 undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang peradilan umum.
- Pasal 4 dan pasal 5 undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Komite HAM PBB menyatakan “bantuan penasihat hukum harus dijamin, melalui bantuan hukum seperlunya, secepatnya saat penangkapan dan dikeseluruhan proses peradilan terhadap orang yang dituduh melakukan kejahatan serius, terutama dalam kasus yang diancamkan sanksi hukuman mati.⁶³ Komite HAM PBB juga menklarifikasi penyangkalan hak bantuan hukum kepada seorang terpidana mati yang tidak bisa membayar penasihat hukum, bukan hanya melanggar hak atas penasihat hukum, tetapi juga hak mengajukan banding.⁶⁴ Sebagai tambahan, hak atas penasihat hukum juga mencakup hingga prosedur permohonan grasi dan pada individu yang mengupayakan peninjauan kasusnya oleh Mahkamah Konstitusi.⁶⁵

2. Hak Untuk Segera Menghadap Hakim

Semua orang yang ditangkap atau ditahan sehubungan dengan tuntutan pidana harus diajukan seseorang hakim

⁶³ Komite HAM, Concluding observation of the Human Rights Committee: Trinidad and Tobago, [Kesimpulan observasi Komite HAM : Trinidad dan Tobago] UN Doc. CCPR/CO/70/TTO, 3 November 2000, Paragraf 7.

⁶⁴ Komite HAM, Komentari Umum No. 32.

⁶⁵ Panduan 6 paragraf 47 (c) tentang prinsip bantuan hukum, (Prinsip-Prinsip dan Panduan PBB atas akses Bantuan Hukum dalam sistem hukum pidana/ *the UN Principles and Guidelines on Access to legal Aid in Criminal Justice Systems*), UN Doc. E/CN.15/2012/L.14/Rev.1, 25 April 2015.

atau petugas pengadilan lainnya. Sehingga hak-hak mereka dapat dilindungi.⁶⁶ Pengawasan yudisial terhadap penahanan berfungsi untuk menjaga praduga tidak bersalah dan juga bertujuan untuk mencegah pelanggaran HAM termasuk penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya. Komite HAM beserta Badan Pengawas ICCPR menyatakan bahwa “48 jam biasanya merupakan waktu yang cukup untuk membawa individu dan untuk mempersiapkan sidang peradilan ; keterlambatan lebih dari 48 jam harus benar-benar dalam situasi luar biasa dan dapat dibenarkan. Penahanan lebih lama dalam tahanan aparat penegak hukum tanpa kontrol peradilan meningkatkan resiko terjadinya perlakuan buruk”.⁶⁷ Khusus untuk Indonesia, pelapor khusus PBB untuk penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, setelah kunjungannya ke Indonesia pada tahun 2007, merekomendasikan prioritas mendesak, untuk mengurangi masa tahanan polisi maksimal 48 jam sesuai dengan standar internasional, dimana setelahnya tahanan harus dipindahkan ke fasilitas dengan kewenangan berbeda, dan tidak lagi berhubungan dengan interogator atau penyidik tanpa pengawasan. Dia juga

⁶⁶ Pasal 9(3) ICCPR

⁶⁷ Komite HAM, Komentor Umum No. 35, UN Doc. CCPR/C/GC/35, paragraf 33 (2014).

merekomendasikan agar hakim dan jaksa harus secara rutin menanyai orang yang tiba dari tahanan polisi tentang bagaimana mereka diperlakukan, dan bahwa jika hakim dan jaksa mencurigai bahwa orang tersebut telah mengalami perlakuan buruk dari tahanan, mereka harus meminta pemeriksaan medis yang independen bahkan jika tidak ada keluhan resmi dari terdakwa.⁶⁸

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tersangka dapat ditangkap dan ditahan oleh polisi selama satu hari.⁶⁹ Selanjutnya seorang penyidik dalam hal ini adalah pihak kepolisian dapat menahan tersangka sampai 20 hari, dengan kemungkinan perpanjangan diberikan oleh Kepala Kejaksaan untuk 40 hari selanjutnya.⁷⁰ Polisi dapat menahan tersangka selama total 61 hari. Tersangka kemudian dapat ditahan oleh Jaksa selama 20 hari, dengan kemungkinan perpanjangan yang diberikan oleh kepala pengadilan negeri untuk 30 hari selanjutnya.⁷¹ Selanjutnya, tersangka yang dituduh dengan kejahatan yang diancam sembilan tahun penjara atau lebih, dapat ditahan selama 60

⁶⁸ Laporan Pelapor Khusus PBB tentang penyiksaan dan perlakuan dan hukuman lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat : Kunjungan ke Indonesia [*Report of the UN Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment: Mission to Indonesia*], UN Doc. A/HRC/7/3/Add.7, 10 Maret 2008, paragraf 59, 78, 80.

⁶⁹ Pasal 18 dan 19 KUHAP.

⁷⁰ Pasal 24(1) dan (2) KUHAP.

⁷¹ Pasal 25(1) dan (2) KUHAP.

hari oleh hakim ketua pengadilan negeri tanpa si tersangka menghadap ke pengadilan.⁷²

3. Hak Untuk Mengajukan Banding

Siapapun yang dijatuhi hukuman karena suatu tindak pidana yang telah dilakukannya, memiliki hak agar hukuman dan keputusan terhadap mereka ditinjau oleh pengadilan yang lebih tinggi.⁷³ Hukuman mati hanya dapat dilakukan setelah persidangan terakhir oleh pengadilan yang berwenang.⁷⁴ Jaminan perlindungan PBB menyatakan bahwa eksekusi mati tidak mungkin dilakukan ketika “banding atau prosedur bantuan lain atau proses lain yang berkaitan dengan pengampunan atau penggantian hukuman masih berlangsung”. Di dalam sistem hukum positif Indonesia terdapat tiga lapisan proses pidana : Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Hukuman mati dapat dijatuhkan pada tiap tahapan hukuman ini.⁷⁵ Sistem Hukum Indonesia menetapkan upaya hukum luar biasa setelah putusan Mahkamah Agung melalui proses Peninjauan Kembali (PK). Dalam satu kasus, butuh waktu hampir 10 tahun agar permohonan peninjauan kembali diperiksa.

⁷² Pasal 29(1-3) KUHAP.

⁷³ Pasal 14(5) ICCPR; Pasal 40(2)(b)(v) Konvensi Hak Anak PBB; Pasal 18(5) Konvensi Buruh Migran.

⁷⁴ Pasal 6(2) ICCPR; Paragraf 5 *the Death Penalty Safeguards*.

⁷⁵ Pasal 84-88 KUHAP.

4. Hak untuk mencari Pengampunan dan keringanan hukuman.

Pasal 6 ayat 4 ICCPR dan ayat 7 Jaminan Perlindungan (*Safeguards*) PBB yang menjamin perlindungan hak-hak terpidana yang menghadapi hukuman mati, menjamin hak siapapun yang dijatuhi hukuman mati untuk mencari pengampunan, grasi, atau keringanan hukuman. Pejabat berwenang benar-benar harus mempertimbangkan permintaan tersebut. Mahkamah Internasional berpandangan bahwa prosedur grasi tersebut, meski dilakukan oleh eksekutif, bukannya yudikatif, merupakan bagian integral dari sistem secara keseluruhan untuk memastikan keadilan dan kewajaran (*justice and fairness*) dalam proses hukum.⁷⁶ Di Indonesia, kekuasaan untuk memberikan pengampunan atau grasi, atau peringanan hukuman mati berada ditangan presiden.⁷⁷ Presiden memutuskan apakah akan menerima atau menolak permohonan grasi setelah berkonsultasi dengan Mahkamah Agung.⁷⁸ Undang-undang tentang Grasi tidak mensyaratkan Presiden untuk memberikan alasan atau penjelasan untuk menolak permohonan Grasi.

5. Hak-hak atas peradilan yang adil.

Pasal 6 ayat 1 ICCPR memberikan perlindungan dari perampasan nyawa secara sewenang-wenang, yang,

⁷⁶ Avena Case (Mexico v United States), ICJ (2004) Paragraf . 142.

⁷⁷ Pasal 14 (1) UUD.

⁷⁸ Pasal 11 UU. No. 5 tahun 2010 tentang Grasi.

bersamaan dengan penyiksaan dan perlakuan dan hukuman buruk lainnya, dilarang secara mutlak berdasarkan hukum kebiasaan Internasional.⁷⁹

Pasal 14 ICCPR menetapkan standar-standar peradilan yang adil. Hal ini termasuk hak dari tiap orang yang menghadapi tuntutan pidana atas pengadilan publik yang adil dihadapan *tribunal* yang kompeten, independen, dan imparial ; hak dianggap tidak bersalah hingga terbukti bersalah, hak mendapatkan informasi secara cepat dan mendetail dalam bahasa yang dipahami mengenai sifat dan penyebab tuntutan atas mereka, hak atas waktu yang cukup, dan fasilitas untuk menyiapkan pembelaan, hak untuk berkomunikasi dengan penasihat pilihan terdakwa, hak atas bantuan hukum secara gratis jika terdakwa tidak mampu membayar, hak memeriksa saksi penuntutan dan menghadirkan saksi untuk membela diri, hak atas bantuan penerjemah secara gratis bila diperlukan, hak untuk tidak dipaksa bersaksi atas diri sendiri atau mengaku bersalah, dan hak naik banding ke pengadilan yang lebih tinggi.

⁷⁹ Komite HAM PBB, Komentar Umum 24, paragraf 8; Laporan Pelapor Khusus PBB tentang eksekusi ekstrajudisial, UN Doc. A/67/275, 2012, paragraf 11; Komite anti penyiksaan, komentar umum 2, paragraf 1.

Ketika para terpidana mati itu sudah tidak memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum sesuai ketentuan undang-undang, Kejaksaan akan segera melaksanakan eksekusi.

Tabel 3. (upaya hukum yang dilakukan oleh para terpidana mati, Data Ditjen Pemasyarakatan, per Desember 2011)

TERPIDANA MATI			
Jenis Kejahatan	Jumlah	Upaya Hukum	Jumlah
<i>Narkotika dan Psikotropika</i>	58	Banding	9
<i>Terorisme</i>	2	Kasasi	19
<i>Pembunuhan dan Perampokan</i>	53	Peninjauan Kembali	36
		Grasi	23
Total	113	Total	113

Sumber : Kejaksaan Agung (Desember 2011)

Pemerintah Indonesia telah berulang kali menyatakan bahwa mereka menerapkan hukuman mati sesuai dengan hukum dan standar Internasional. Dalam laporan ini, *Amnesty International* menyoroti 12 kasus individu terpidana mati (dari total 131 terpidada perDesember 2014) yang menggambarkan bagaimana administrasi peradilan di Indonesia melanggar hukum dan standar-standar HAM internasional. Di bawah standar-standar HAM internasional, orang-orang yang terancam pidana dengan hukuman mati berhak atas pelaksanaan yang ketat dari semua jaminan peradilan yang adil dan atas suatu jaminan perlindungan tambahan.

- **Agus Hadi**, 53 tahun, dan **Pujo Lestari**, 39, berasal dari Riau, Indonesia. Mereka bekerja sebagai awak kapal. Agus Hadi adalah lulusan sekolah dasar sementara Pujo Lestari lulusan sekolah menengah atas. Mereka berdua ditangkap patroli laut di Batam, Provinsi Kepulauan Riau, karena mencoba menyeludupkan 12.490 pil benzodiazepine (obat penenang yang dikenal di kalangan pengguna narkoba sebagai 'Happy Five Erimin') dari Malaysia. Mereka dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati pada tahun 2007. Mereka telah menghabiskan segala upaya hukum yang tersedia.
- **Zainal Abidin** berusia 51 tahun ketika dia dieksekusi mati. Dia bekerja sebagai pemoles kayu dan merupakan lulusan sekolah dasar. Ditangkap oleh Polisi Kota Palembang dan didakwa dengan kepemilikan 58,7kg ganja pada 21 Desember 2000. Dia dijatuhi hukuman penjara 18 tahun oleh Pengadilan Negeri Palembang pada tahun 2001. Namun saat proses banding, dia dipidana dan dijatuhi hukuman mati dalam perkara perdagangan narkoba pada tahun 2001. Dia dieksekusi mati pada 29 April 2015.
- **Ruben Pata Sambo**, 70 tahun, dan anaknya **Markus Pata Sambo**, 40 tahun, berasal dari Tana Toraja, Indonesia. Mereka dipidana dan dijatuhi hukuman mati atas pembunuhan empat anggota keluarga di Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, pada tahun 2006. Mereka telah menempuh semua upaya hukum yang tersedia.

- **Zulfiqar Ali**, warga negara Pakistan berusia 51 tahun. Dia adalah seorang pengusaha garmen. Dia ditangkap di rumahnya di provinsi Jawa Barat pada 21 November 2004, dan didakwa dengan kepemilikan 300g heroin. Dia dipidana dan dijatuhi hukuman mati pada tahun 2005. Putusannya dikukuhkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2006.
- **Raheem Agbaje Salami** (atau Jamiu Owolabi Abashin), adalah seorang warga negara Nigeria, dia berusia 50 tahun ketika dieksekusi mati. Dia ditangkap oleh polisi dari Polisi Daerah Jawa Timur setelah kedapatan membawa 5,28kg heroin pada 2 September 1998. Dia dipidana dan dijatuhi hukuman mati atas perkara perdagangan narkoba pada tahun 1999 oleh Mahkamah Agung. Dia dieksekusi mati pada 29 April 2015.
- **Namaona Denis** (atau Solomon Chibuke Okafor) berusia 48 tahun Ketika dia dieksekusi mati. Awalnya dia dihukum dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Tangerang karena mengimpor heroin ke Indonesia. Dia kemudian dipidana dan dijatuhi hukuman mati atas kasus perdagangan narkoba [mengimpor heroin ke Indonesia] pada tahun 2001. Dia dieksekusi mati pada 18 Januari 2015.
- **Christian** (Warga Negara Indonesia), usia 54 tahun, merupakan seorang pedagang tepung terigu. Dia dipidana dan dijatuhi hukuman mati karena perdagangan narkoba (mengimpor pil ekstasi

ke Indonesia) pada tahun 2008. Putusan hukuman matinya dikukuhkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2009.

- **Yusman Telaumbanua** berasal dari Riau, Indonesia. Dia bekerja sebagai buruh perkebunan. Dia meninggalkan sekolah dasar dan tidak dapat membaca atau menulis. Menurut polisi dia lahir pada tahun 1993, namun Yusman mengaku dia lahir pada tahun 1996, yang berarti dia bisa jadi berusia di bawah 18 tahun pada saat kejahatan dilakukan dan Ketika dia dijatuhi hukuman mati. Dia dipidana dan dijatuhi hukuman mati atas pembunuhan tiga orang pada April 2013 di kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara. Dia tidak mengajukan banding karena dia tidak diberitahu oleh pengacaranya bahwa dia memiliki hak untuk mengajukan banding.
- **Mary Jane Veloso**, warga negara Filipina berusia 30 tahun, dia bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Dia dihukum dan dijatuhi hukuman mati karena perdagangan narkoba (mengimpor heroin ke Indonesia) pada tahun 2010. Eksekusi matinya dihentikan pada menit terakhir pada tanggal 29 April 2015, sehingga dia bisa memberikan kesaksian di persidangan atas orang yang dituduh memperdayanya untuk menjadi kurir narkoba.

Pada 12 kasus yang di dokumentasikan dalam laporan ini, *Amnesty International* menemukan bahwa para terdakwa tidak memiliki akses ke penasihat hukum sejak waktu penangkapan dan dalam berbagai tingkatan persidangan dan banding, dan bahwa mereka mendapat perlakuan buruk

saat berada di tahanan polisi untuk memaksa mereka "mengakui" dugaan kejahatannya atau menandatangani laporan penyelidikan polisi. Semua 12 tahanan dibawa menghadap hakim untuk pertama kalinya ketika persidangan mereka dimulai, berbulan-bulan setelah penangkapan.

Standar-standar internasional peradilan yang adil menjamin hak warga negara asing agar segera diberitahu tentang hak mereka untuk berkomunikasi dengan kedutaan atau konsuler, dan untuk didampingi seorang penerjemah independen segera setelah mereka ditangkap. Perlindungan hak-hak ini sangat relevan dalam konteks Indonesia, mengingat sejumlah besar terpidana mati adalah warga negara asing, khususnya mereka yang dihukum karena kejahatan terkait narkoba. *Amnesty International*, menemukan bahwa dalam beberapa kasus pemerintah Indonesia telah gagal mengidentifikasi atau memverifikasi identitas tahanan dengan benar. Lebih jauh lagi, hukum Indonesia menolak kemungkinan bagi warga negara asing untuk menggugat kebijakan di Mahkamah Konstitusi, termasuk gugatan yang dapat mempengaruhi kebijakan hukuman mati negara itu.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan Rumusan Masalah dan Pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka kesimpulan yang dapat penulis simpulkan adalah sebagai berikut :

1. Penerapan sanksi hukuman mati dalam sistem hukum positif di Indonesia masih tetap berlangsung, walaupun banyak terjadi pro dan kontra dalam hal penerapan dan pelaksanaanya, keberadaan hukuman mati masih dianggap perlu meskipun penerapannya sudah dibatasi dalam hukum Internasional.
2. Disisi lain pemenuhan hak-hak terpidana mati bagi terpidana mati warga negara asing telah diterapkan oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan standar perlakuan menurut ketentuan hukum Internasional..

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas. maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Membentuk sebuah badan independen dan tidak memihak, atau memberikan mandat kepada institusi yang sudah ada, untuk meninjau semua perkara hukum yang mana terjadi penjatuhan

hukuman mati, dengan maksud untuk meringankan hukuman mati, terutama dalam perkara yang mana hukuman mati dijatuhkan pada pelanggaran terkait narkoba atau ketika persidangan yang tidak memenuhi standar Internasional peradilan yang adil yang paling ketat, atau dalam perkara yang secara prosedural cacat, lalu menawarkan pengadilan ulang yang selaras dengan standar internasional peradilan yang adil serta tidak menggunakan ancaman pidana mati.

2. Membuat kebijakan nasional yang memungkinkan pelaksanaan hukuman mati berjalan sesuai dengan hukum dan standar internasional, termasuk menghilangkan ancaman hukuman mati bagi kejahatan selain pembunuhan berencana, dan memastikan bahwa semua orang yang telah dijatuhi hukuman mati karena kejahatan lainnya, khususnya kejahatan narkoba, diberi keringanan hukum yang sesuai.
3. Memastikan bahwa proses hukum terkait dengan tindak pidana yang terancam hukuman mati, menghormati standar paling ketat yang diakui secara internasional untuk peradilan yang adil, termasuk mengimplementasikan semua rekomendasi yang relevan, yang dibuat oleh Komite Hak Asasi Manusia (*Human Rights Committee*) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan Komite PBB Menentang Penyiksaan (*UN Committee against Torture*).

DAFTAR PUSTAKA

Adolf, Huala, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Grafindo, Jakarta, 2002.

Andi Hamzah, dan A. Simangelipu, *Pidana Mati dimasa lalu, kini dan dimasa depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993.

Ardhiwisastra, Yudha Bhakti, *Hukum Internasional Bunga Rampai*, Alumni, Bandung, 2003.

Arie Siswanto, *Yuridiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.

Djoko Prakoso & Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.

Haribertus Jaka Triyana, *Materi Kuliah Hukum HAM Internasional*, Program Studi Pascasarjana Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta. : UGM, 2007.

Istanto, Sugeng, *Hukum Internasional*, Penerbit Univ. Atmajaya, Yogyakarta, 1998.

L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, P.T. Pradnya Paramita, Jakarta, 2000.

Levin Leah, *Tanya Jawab Soal Hak Asasi Manusia*, Paradnya Paramita, Jakarta, 1987.

Mansyur Effendi, *Perkembangan dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses dinamika penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.

Mauna, Boer, *Hukum Internasional Peranan, Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2001.

Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, P.T. Alumni, Bandung, 2003.

Mutfi Makarim, *Beberapa Pandangan Tentang Hukuman Mati (Death Penalty) Dan Relevansinya Dengan Perdebatan Hukum Di Indonesia*, Pusat Dokumentasi ELSAM.

M Zen Abdullah, *Pelaksanaan Pidana Mati telaah dalam konteks Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah, Universitas Jambi, 2009.

Parthiana, I, Wayan, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian Pertama*, Mandar Maju, Bandung, 2002.

Philip Nonet & Philip Selznick, *Hukum Responsif*, Nusamedia, Bandung, 2007.

Randy Piangga Basuki Putra, *Penerapan Pidana Mati dalam Sistem Hukum Indonesia*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional, Veteran, Jawa Timur, 2012.

R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia* (Edisi Revisi), Rajawali Pers, Jakarta, 2005.

Starke, J.G., *Hukum Internasional 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.

Starke, J.G., *Hukum Internasional 2*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

Thontowi, Jawahir, dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung, 2006.

Internet-Internet

<http://kabarmedan.com/hukuman-mati-antara-kedaulatan-hukum-dan-hubungan-antar-negara/>.

http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=140.

<http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2259119-fungsi-dan-tujuan-hukuman-/#ixzz2LUmmYmMn>.

<http://www.deathpenaltyinfo.org/documents/FactSheet.pdf>.

<http://serojanews.blogspot.co.id/2015/05/inilah-beberapa-cara-eksekusi-hukuman.html>.

<http://segalainfo.com/5-jenis-hukuman-mati-yang-paling-cepat/>.

<http://kabarmedan.com/hukuman-mati-antara-kedaulatan-hukum-dan-hubungan-antar-negara/>.

<http://jurnalhukum.blangspot.com/2007/05/penelitian-hukum-hukuman-mati-dan-hak.html>.